

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA**

**(STUDI KASUS SUHARTINI SEBAGAI KEPALA DESA KARANGSARI  
KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Mita Ainul Qulubutthohiroh**

1906016021

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَم

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan Rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur Jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus Suhartono sebagai Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)” merupakan tugas akhir yang dihadirkan peneliti sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi jenjang Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta wakil Dekan I, II, dan III UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan dan sekaligus menjadi sumber motivasi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang juga telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan dan sekaligus menjadi sumber motivasi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Walis Dosen saya selama saya menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang juga telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan dan sekaligus menjadi sumber motivasi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Masrohatun M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, dorongan, dan arahan yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Ibu telah menjadi sumber inspirasi dan panutan yang tak ternilai, membimbing saya melalui setiap langkah perjalanan ini. Terimakasih atas kesabaran, dedikasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian. Semua kontribusi dari Ibu sangat berarti bagi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan dedikasinya.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama berproses di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap jajaran tenaga pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu segala kebutuhan administrasi sehingga membantu penulis memperlancar penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Pemerintah Daerah dan segenap masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan yang telah banyak membantu dalam melakukan penelitian terkait.
9. Kakak-kakaku tersayang Aro Fajru Dluha, Mila Ismatul Maula, Siti Maslamah atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
10. Adik tersayang Aulia Akbrina Mecca atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
11. Nenek tersayang Mbh Musyarofah atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
12. Ibu Mertua Ibunda Sholikhatun dan ayah mertua Ayahanda Slamet Djaelani atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
13. Sahabatku Alif Ishlahul Wahidah dan Westiana Indri A selaku sahabat seperjuangan skripsi yang senantiasa menemani dan berjuang bersama.

14. Sahabat-sahabatku Aqila Choirun Nisa, Unas Farcha Nabiela, Hanna Tsurayya Saifani, Silfi Aulia Annisa, Sarah Stevana Wong, Miftahul Fadlilah, Farida Fatmawati yang selalu mendukung dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2019, terkhusus kepada teman-teman Ilmu Politik Kelas A yang telah menemani perjalanan penelitian selama 4 tahun proses perkuliahan. Mari berjanji untuk bertemu dikemudian hari ketika kita telah meraih mimpi dan kesuksesan dikehidupan kita masing-masing.
16. Seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, para senior dan junior, serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Amin.

**SKRIPSI**  
**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA**  
**DESA (STUDI KASUS SUHARTINISEBAGAI KEPALA**  
**DESA KARANGSARI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN**  
**TAHUN 2021)**

Oleh:  
**MITA AINUL QULUBUTTHOHIROH**  
1906016021

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 07 April 2024  
dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

  
Masrohatun, M.Si.

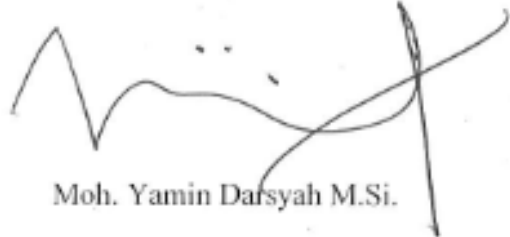
Sekretaris

  
Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si.

Penguji I

  
Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si.

Penguji II

  
Moh. Yamin Darsyah M.Si.

Pembimbing

  
Masrohatun, M.Si.

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirahim*

Dengan mengucapkan doa dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua yang sngat saya cintai yaitu Ayahanda Muhammad Rodli dan Ibunda Susilowati yang telah membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mendoakan saya untuk senantiasa dipermudah segala urusan dan dikabulkan semua doa-doa saya, dan yang selalu mendukung segala keputusan yang saya pilih. Dan juga teruntuk suami saya tercinta mas Mochammad Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti utuk kesuksesan dan cita-cita suami mu ini, makasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini.

## **MOTTO**

“Kujadikan lelahku sebagai awal dari kesuksesanku, Never Give Up and keep trying as hard as possible”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	
NOTA PEMBIMBING .....	
KATA PENGANTAR.....	
PERSEMBAHAN.....	
MOTTO.....	
ABSTRAK .....	
ABSTRACT .....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah .....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan Penelitian .....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Tinjauan Pustaka.....	
F. Metode Penelitian.....	
G. Sistematika Penulisan.....	
BAB II KEPEMIMPINAN.....	
A. Kepemimpinan.....	
B. Kepemimpinan Perempuan .....	
C. Good Governance .....	
BAB III PROFIL DESA DAN KEPALA DESA KARANGSARI.....	
A. Profil Desa Karang Sari .....	
B. Profil Kepala Desa Karang Sari Suhartini .....	
BAB IV KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA .....	
A. Akuntabilitas .....	
1. Kualitas kerja dan kedisiplinan .....	
2. Produktifitas dan pengetahuan .....	
3. Kepuasan masyarakat menggunakan layanan pemerintah.....	
B. Transparansi .....	



1. Ketersediaan informasi yang dapat diakses masyarakat .....	
2. Keterbukaan proses .....	
C. Partisipasi .....	
1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (perencanaan) .	
2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan .....	
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (pengawasan) .....	
4. Partisipasi dalam evaluasi .....	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## **ABSTRAK**

The purpose of this study is to understand the role of village heads in managing regional finances. This is reviewed through three basic points: community participation, transparency, and accountability from the general public and each village apparatus.

The research location is located in Karang Sari Village, Brati District, Grobogan Regency. In this study using qualitative research methodology with a focus on phenomenon analysis. The data used in this study came from the results of structured observations, documented data, and information established as research subjects. Research data processing is carried out with the stages of data collection, data presentation, triangulation of data analysis, and final conclusion. All research findings show that the land use and development of Karang Sari Village is currently legal and in accordance with the principles of good governance, which consists of the principles of accountability, transparency, and participation of all community members and the Karang Sari Village Government.

**Keywords: Village Fund, Good Governance, Fenmenology.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran kepala desa dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini ditinjau melalui tiga pokok dasar: partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dari masyarakat umum dan masing-masing aparatur desa.

Lokasi penelitian terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi terstruktur, data terdokumentasi, dan informasi yang ditetapkan sebagai subjek penelitian. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, triangulasi analisis data, dan penyimpulan akhir. Seluruh temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan dan pembangunan Desa Karang Sari saat ini sudah sah dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yang terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi seluruh warga masyarakat dan Pemerintah Desa Karang Sari.

**Kata Kunci : Dana Desa, Good Governance, Fenomenologi.**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepemimpinan adalah konsep yang melibatkan suatu keahlian atau kemampuan pada seseorang untuk dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai apa itu tujuan bersama. Ini melibatkan penggunaan berbagai keterampilan dan gaya untuk memotivasi, membimbing, dan mengkoordinasi individu atau kelompok dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selain mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memimpin, konsep kepemimpinan juga mempengaruhi interpretasi tentang berbagai aspek organisasi dan hubungan antarindividu. Kepemimpinan dapat membentuk karakter dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin akan memengaruhi bagaimana orang lain dalam organisasi menafsirkan nilai-nilai, tujuan, dan norma yang dianut (Rivai, 2006).

Pemimpin memiliki peran kunci dalam menetapkan visi jangka panjang dan tujuan strategis untuk negara atau bangsa. Visi yang jelas dan ambisius dari pemimpin dapat mengilhami dan memotivasi masyarakat untuk bekerja menuju kemajuan yang lebih besar. Pemimpin yang inovatif dan progresif dapat memperkenalkan kebijakan dan program yang mendorong inovasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai "panutan", para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Tindakan, nilai, dan integritas mereka dapat memengaruhi perilaku dan sikap yang diadopsi oleh orang lain. Oleh karena itu, integritas dan moralitas pemimpin sangat penting dalam membentuk budaya dan norma di masyarakat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa para pemimpin juga manusia dengan kelemahan dan keterbatasan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak realistis untuk mengharapkan bahwa semua pemimpin akan selalu menjadi teladan yang sempurna. Perilaku dan kepemimpinan mereka dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, budaya, atau situasi eksternal tertentu yang mengharuskan masyarakat selektif dalam memilih sosok pemimpin (Marzali, 2005)

Kepemimpinan yang tidak kompeten atau kepemimpinan yang tidak transparan dapat menimbulkan korupsi (Marwiyah, Wicaksono, Wahyuni, Kharimah, & Tiantoro, 2022). Kepemimpinan yang tidak kompeten mengindikasikan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang operasi dan kebijakan yang diterapkan di dalam organisasi (Fitriyah & Setiyadi, 2018). Hal ini bisa menyebabkan pengawasan yang kurang efektif terhadap dana dan sumber daya. Kurangnya pemahaman juga dapat berarti kurangnya tanggung jawab atas

apa yang sudah menjadi tindakan dan keputusan yang sudah mutlak diambil, yang pada gilirannya dapat memicu praktik korupsi.

Korupsi memang merupakan fenomena yang serius dan memerlukan perhatian lebih karena dampak negatifnya yang luas terhadap masyarakat dan pemerintahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, korupsi adalah ancaman serius terhadap penggunaan Dana Desa. Pejabat desa atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas alokasi dan pengelolaan dana ini dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap atau mengalihkan dana ke proyek-proyek palsu. Berbagai cara telah dilakukan untuk meminimalisir praktik korupsi namun masih belum memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah praktik korupsi. Adanya anggaran Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah dapat memicu peluang adanya praktik korupsi di tingkat Pemerintah Desa (Wirawan Hardianto, 2020).

Desa memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Kedaulatan desa diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, desa memiliki kewenangan dan otonomi tertentu dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan memainkan peran ini, desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Desa diharapkan dapat menjadi basis pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, peran desa sangat vital dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Indonesia (S. Prakarsa, 2016).

Kepemimpinan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan organisasi, misal Pemerintah Desa. Dengan adanya kepemimpinan memudahkan pengelolaan itu bisa berjalan dengan baik karena ada ketegasan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tegas melahirkan kebijakan-kebijakan yang jelas dan terarah. Kepemimpinan juga menjadi indikator penting untuk melihat keberhasilan organisasi. Pada beberapa kasus kepemimpinan yang tidak baik sehingga menimbulkan, contohnya kasus korupsi (Suhadi, Taufiq, & Wardani, 2020).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Taman Jaya yaitu penyalahgunaan ADD di Desa Taman Jaya dengan faktor penyebabnya mulai dari proses pelaksanaan dan pengawasan Kepala Desa Taman Jaya tidak melibatkan masyarakat, seharusnya Kepala Desa mengumpulkan masyarakat desa yang mewakili seluruh unsur desa seperti kelompok pemuda, tani dan perempuan serta Badan Permusyawaratan Desa tujuannya menjelaskan tentang maksud terimanya ADD, selain itu peran aktif masyarakat untuk mengetahui

informasi tentang ADD dibatasi dan masih rendahnya latar belakang pendidikan Kepala Desa dan perangkat desa (Safitri, 2022).

Kepemimpinan Kepala Desa sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh signifikan pada pengelolaan dana desa seperti hasil penelitian (Khusnia, 2022). Khusnia menyampaikan bahwasannya Kepala Desa yang memiliki kemampuan mengelola dana desa mampu memimpin desa secara kompeten dengan menerbitkan program yang tepat. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa seperti yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya diatas dikarenakan Kepala Desa memiliki peran yang signifikan. Oleh karena itu dibawah ini beberapa contoh keberhasilan Kepala Desa di dalam mengelola Dana Desa didasarkan pada kompetensi Kepala Desa sehingga melahirkan program-program yang tepat (Fauzun, 2020) dan (Setiawan, 2020).

Desa Karang Sari memiliki unsur kepemimpinan yang tepat juga terlihat dari Suhartini dalam memimpin desa ini. Desa Karang Sari merupakan desa yang terletak di kecamatan Brati yang termasuk dalam wilayah kabupaten Grobogan. Desa Karang Sari pada tahun 2021 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.125.068.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah). Pada pengelolaan keuangan anggaran dana desa sebenarnya kepala desa dapat memberikan petunjuk sebagai contoh peneglolaan keuangan yang baik dengan mencegah serta adanya penanggulangan dalam penyalahgunaan serta penyelewengan anggaran tersebut. Background organisasi yang kuat dan aktif yaitu beliau yang seorang aktivis politik, aktivis organisasi (organisasi PKK, organisasi Darmawanita, Organisasi Pemuda, Fatayat, Muslimat), dan juga ibu rumah tangga menjadikan beliau lebih tegas dalam mengambil keputusan, dicontohkan dari tindakan Ibu Suhartini dalam mengelola keuangan desa yang akuntabel. Dari hasil ketegasan itu dibuktikan dengan penerimaan penghargaann desa terbaik dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2021 dalam tingkat Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah (Azmi, 2021).

Desa Karang Sari memiliki pemimpin perempuan bernama Ibu Sumarni yang menjabat sebagai kepala desa dan memiliki kompetensi yang sudah teruji dalam pengelolaan dana desa. Kepemimpinan perempuan ini mampu memberikan contoh keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaann desa terbaik dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2022 dalam tingkat Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah.

Suhartini sebagai salah satu pemimpin perempuan yang diberi amanah menjabat sebagai Kepala Desa sudah dianggap Kepala Desa yang tegas dan jujur, ketegasan Suhartini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang cukup berani, diantaranya prinsip bahwa setiap penggunaan anggaran atau informasi laporan harus disampaikan melalui musyawarah desa merupakan salah satu pendekatan partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Hal ini

mencerminkan upaya untuk melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terkait penggunaan dana desa. Prinsip lain yang dijalankan yaitu transparansi pelaporan dengan melakukan publikasi pada papan informasi dan laman resmi desa. Beliau juga berani mengambil sikap kepada perangkat desa yang tidak disiplin, mereka yang ketahuan tidak berangkat selama tiga hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas langsung diberhentikan ataupun diberi sanksi yang tegas dengan diberhentikannya sebagai perangkat desa. Ketegasan suhartini ini juga dikaitkan dengan kesuksesan beliau dalam mengelola dana desa di Desa Karang Sari mendapat penghargaan sebagai Desa terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa. Suhartini ini termasuk sosok pemimpin yang demokratis. Kedemokratisan ini bisa dilihat dari background dia sebagai aktivis politik, aktivis organisasi, dan aktivis diskusi publik. Ibu Suhartini menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa berupa efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penyerapan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD). Melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan penyaluran dana desa sampai tahap kedua dengan cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut menarik dikarenakan pada saat ini terdapat beberapa kepala desa yang mengalami kesusahan dalam mengelola dana desa dengan adanya kasus korupsi dan pengelolaan dana desa (Hastuti & Ahmad, 2022).

Desa Karang Sari memperoleh penghargaan desa terbaik dalam pengelolaan dana desa tidak lepas dari peran kepemimpinan kepala desa perempuan yaitu Ibu Suhartini. Ibu Suhartini menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa berupa efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penyerapan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD). Melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan penyaluran dana desa sampai tahap kedua dengan cepat dan tepat sasaran. Hal tersebut menarik dikarenakan pada saat ini terdapat beberapa kepala desa yang mengalami kesusahan dalam mengelola dana desa dengan adanya kasus korupsi dan pengelolaan dana desa.

Pemerintahan desa terdiri atas berbagai unsur dan lembaga yang bekerja sama untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Di Indonesia, struktur pemerintahan desa umumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada umumnya, desa dipimpin oleh seorang laki-laki sebagai kepala desa. Dalam konteks tradisional, laki-laki sering dianggap lebih memenuhi kriteria kepemimpinan yang dianggap ideal berdasarkan standar budaya dan sosial tertentu. Selain itu, laki-laki juga mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendidikan formal atau pengalaman yang mendukung karir politik dan pemerintahan. Dengan

perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia, posisi kepemimpinan mulai semakin diduduki oleh wanita. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan desa. Dalam Islam, perintah untuk mencari ilmu pengetahuan dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu hadis menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim (laki-laki dan perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan (Nurcholis, 2011).

Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi mengalami hambatan dalam akses dan kesempatan untuk terlibat dalam politik atau kegiatan publik lainnya. Misalnya, terbatasnya jaringan atau akses terhadap sumber daya politik yang membatasi kemampuan perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk berkembang dalam karir profesional, termasuk dalam jabatan-jabatan strategis. Keunggulan yang mengesankan tersebut harus mendapat dukungan yang serius guna menghilangkan stigma perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi. Organisasi wanita sering didirikan untuk melakukan advokasi dan perubahan sosial terkait dengan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dalam masyarakat. Mereka bekerja untuk menciptakan kesadaran, mengubah kebijakan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Organisasi wanita ditandai dengan pengabdian dan komitmen para anggotanya untuk berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Tujuan-tujuan yang mereka usung biasanya lebih besar daripada kepentingan pribadi individu (Suryocondro, 1948).

Jary dan Jary (dalam Salviana dan Sulistyowati, 2010) mendefinisikan dua dar pengertian gender. Pertama Gender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan antara peran, perilaku, identitas, dan ekspektasi yang masyarakat atributkan kepada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, gender lebih diartikan ke dalam bagian 'masculine' dan 'feminine' melalui proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran aturan, norma, dan ekspektasi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertingkah laku berdasarkan konsep gender yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Proses sosialisasi ini terjadi sepanjang kehidupan seseorang dan memengaruhi cara individu memahami dan mengekspresikan identitas gender mereka. dalam konstruksi sosial yang umum, laki-laki

sering dianggap memiliki sifat-sifat seperti kuat, perkasa, jantan, agresif, dan rasional. Sebaliknya, perempuan sering dikonosasikan dengan sifat-sifat seperti lemah, lembut, cantik, keibuan, pasif, dan emosional. Atribut-atribut ini tercermin dalam norma-norma, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang diterapkan oleh masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Melihat sudut pandang dari luar konteks itu, seorang perempuan sendiri bisa menjadi pemegang kekuasaan dalam sebuah lingkup kecil desa seperti halnya di desa karangsari kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Desa tersebut adalah desa Purworejo, dominan mereka sudah pada mengerti bahwa kepemimpinan dalam desa tersebut dipegang oleh seorang perempuan. Kepala desa tersebut sudah cukup lama dalam hal memimpin desa Karangsari Pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa serta dibantu oleh pamong desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa ketentuan penting yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan desa. Desa adalah unit pemerintahan atau unit administratif terkecil di Indonesia yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat paling bawah. Desa umumnya terdiri dari kawasan geografis yang relatif kecil dan penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan kota atau daerah lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) adalah peraturan yang mengatur tentang pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia. Dalam UU Pemda ini, desa dan kelurahan adalah dua entitas yang memiliki perbedaan dalam konteks pemerintahan daerah. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa umumnya terletak di daerah pedesaan dan memiliki kawasan geografis yang luas. Desa dapat terdiri dari beberapa dusun atau lingkungan; sementara itu kelurahan merupakan unit pemerintahan di tingkat kecamatan yang terletak di daerah perkotaan. Kelurahan umumnya memiliki kawasan geografis yang lebih kecil dibandingkan dengan desa dan terdapat dalam lingkungan perkotaan. (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap unsur dalam pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, mengurus urusan desa, dan mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. (Nurcholis, 2011). Asmara (1986) menyatakan “pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan



Permasyarakatan Desa (BPD). Kedua perangkat desa tersebut, yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Desa, memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa dan mengurus urusan administratif serta keuangan desa”.

Kepala Desa memang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang penting terkait dengan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Hal ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kehidupan masyarakat desa berjalan secara harmonis, berkembang, dan berkualitas. Sebagai seorang Kepala Desa, memberikan pelayanan yang optimal kepada warga desa merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab utama. Pelayanan yang baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Seorang warga desa harus mengetahui siapa pemimpin desanya. Sebagai seorang Kepala Desa perempuan di Karang Sari, memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun kepemimpinan perempuan telah mengalami perkembangan positif, masih terdapat pandangan negatif atau stereotip yang dapat membuat kepemimpinan perempuan dianggap sebelah mata. Namun, peran dan kontribusi kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang semakin diakui dan penting dalam mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat pada fakta yang ada di desa Karang Sari dimana banyak warga desa yang tidak mengetahui siapa kepala desanya. Sebagian kecil masyarakat mengetahui bahwa kepala desanya adalah perempuan akan tetapi belum pernah melihat sosoknya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengelolaan Dana Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Tahun 2021. Peneliti ingin menganalisa bagaimana peran pemimpin perempuan dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana cara yang dilakukan untuk menggerakkan organisasi dibawah kepemimpinannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa ditentukan oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi bagaimana dana tersebut digunakan dan dampaknya pada pembangunan dan kesejahteraan di desa. Berlandaskan pada pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Kepemimpinan Suhartini selaku Kepala Desa Karang Sari dalam Pengelolaan Dana Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan Kepemimpinan Suhartini selaku Kepala Desa Karang Sari dalam mengelola dana desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti, mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran dan dampak kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan Dana Desa Karang Sari. Peneliti juga akan mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis data yang berguna dalam karier akademik dan profesionalnya.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan baru tentang peran kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan Dana Desa, yang dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang studi yang relevan.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian dapat membantu instansi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan.

### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk memudahkan memetakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, maka peneliti membagi menjadi 3 tema:

#### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Sudah banyak penelitian tentang Dana Desa yang diteliti oleh para pakar diantaranya Agustin, Febrianty, Indrawan, Santi (2017), Widyastuti (2018), Kusnadi (2019), Roza (2021). Artikel oleh Agustin, Febrianty, Indrawan, Santi berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Sambangan Kabupaten Buleleng”. Pada jurnal ini dibahas tentang dana desa sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat desa dan secara lebih luas, bagi pembangunan suatu negara. Desa memiliki peran yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, dan penting bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Penulis berfokus pada pemerintah desa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang paling relevan dan mendesak untuk kesejahteraan desa.

Penelitian oleh Widyastuti berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sragen." Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan fokus pada efektivitas penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang peran dan tantangan dalam pengelolaan dana desa serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

Artikel oleh Kusnadi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan." Artikel ini membahas tentang pentingnya pengelolaan dana desa dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan. Penulis menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa, serta peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada staf desa dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian oleh Alfi Roza yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar". Penelitian ini mengkaji pengalokasian dana desa yang dilakukan dengan transparan. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kuantitatif induktif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis sudah baik, tetapi dalam hal pelaporan masih kurang baik dikarenakan masih adanya pegawai desa yang bermalas-malasan didalam pekerjaannya menyebabkan kelambatan didalam pembuatan laporan.

Menurut Halim & Kusufi (2017:15) Akuntansi sektor publik adalah cabang dari akuntansi yang fokus pada pengelolaan keuangan dan pelaporan di sektor pemerintahan dan lembaga publik. Proses akuntansi sektor publik mencakup berbagai aktivitas manajerial dan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dana publik dan pengambilan keputusan. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan keuangan untuk memetakan rencana penggunaan dana publik dalam jangka waktu tertentu. Proses perencanaan anggaran melibatkan penetapan tujuan, identifikasi sumber pendanaan, dan penentuan alokasi anggaran untuk program-program atau kegiatan sesuai prioritas. Dengan demikian, patuh terhadap anggaran adalah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Organisasi-sektor publik diharapkan untuk mengikuti aturan dan regulasi yang terkait dengan anggaran guna mendukung

pencapaian tujuan-tujuan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab.

## 2. Kepemimpinan Perempuan

Sudah banyak penelitian tentang Kepemimpinan Perempuan yang diteliti oleh para pakar diantaranya Wulandari (2016), Werdhani (2020), Fadhilah (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulandari yang berjudul "Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kepala desa perempuan dapat memotivasi partisipasi lebih banyak perempuan dalam proses pengambilan keputusan desa. Ini termasuk partisipasi dalam musyawarah desa dan kegiatan-kegiatan pemerintahan setempat. Penelitian ini menunjukkan dampak kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap kesetaraan gender di desa. Hal ini termasuk peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan, serta perubahan dalam peran dan persepsi gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasbul Bahri, Iman Surya, Melati Damadengan judul "Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemimpin perempuan memberikan dampak positif pada kinerja organisasi. terhadap efektifitas pengelolaan Dana Desa sudah bagus.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fadhilah dengan judul "Pengaruh Women Leadership Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Gaya Kepemimpinan Transformasional Sebagai Moderasi Berdasarkan Perspektif Islam". Penelitian dapat menunjukkan bahwa organisasi atau entitas yang dipimpin oleh perempuan memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Kepemimpinan perempuan seringkali membawa perspektif yang berbeda dan cara berpikir yang kreatif.

## 3. *Good Governance*

Sudah banyak penelitian tentang Kepemimpinan Perempuan yang diteliti oleh para pakar diantaranya Pratiwi & Husodo (2017), Utomo (2018), Prमितasari & Prihatiningsih (2018). Artikel oleh Pratiwi dan Husodo yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa." Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa, termasuk aspek penganggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan. Penulis

menekankan pentingnya peran kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio, Didik G. Suharto dengan Judul “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. *Good governance* dalam pengelolaan dana desa mencakup transparansi dan akuntabilitas. Responsivitas pemerintah desa adalah langkah awal, tetapi perlu juga memastikan bahwa proses penyelesaian keluhan dan pengelolaan dana desa secara keseluruhan tetap transparan dan akuntabel. Daripada itu, LPJ atau laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan telah disampaikan kepada badan penanggungjawab tingkat desa atau yang biasa disebut sebagai BPD dan pertanggungjawaban secara vertikal akuntabilitas yaitu sebagaimana pertanggungjawaban ini atas dasar otoritas yang lebih tinggi.

Artikel oleh Pramitasari dan Prihatiningsih yang berjudul "Analisis Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa." Artikel ini membahas tentang pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penulis menyoroti perlunya peningkatan kapasitas staf desa dalam hal pemahaman aturan dan teknik pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terkait tentang Kepemimpinan dan Good Governance.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **A. Dasar dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian ini merupakan metode yang kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan sebagai dasar memahami serta menjelaskan fenomena sosial dengan mendalam, kompleks, dan kontekstual. Metode ini biasanya digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek subjektif dari suatu topik, seperti pandangan, keyakinan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok. Berdasarkan pada hal tersebut terdapat empat kata kunci pokok yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

#### **1. Jenis Penelitian & Pendekatan**

Jenis penelitian ini melibatkan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metodologi studi kasus. Penelitian lapangan adalah suatu metode yang melibatkan melakukan pengamatan diam-diam pada lokasi tertentu yang dijadikan objek untuk memperoleh data awal dan sekunder (Nazir, 2017). Salah satu jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan indeks, yang terkait dengan proyek penelitian atau studi. (Sugiyono, 2017).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Sugiyono (2016), peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Ini dikenal sebagai studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif di mana penulis melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu program, peristiwa, proses, atau individu yang berkaitan dengan waktu dan aktivitas. (Moleong, 2013).

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1) Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti secara diam-diam dari sumber yang tidak dipublikasikan untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Data ini belum pernah dipublikasikan atau dikumpulkan sebelumnya oleh organisasi lain (Sugiyono, 2015). Data awal meliputi hasil penelitian, observasi observasi yang tidak diobservasi peneliti, dan dokumentasi data primer peneliti. Primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan responden. Peneliti mengajukan pertanyaan yang telah ditanyakan kepada responden dan mencatat atau menarik perhatian terhadap jawaban mereka. Ibu Kepala Desa dan Perangkat Desa Karang Sari dapat dilakukan melalui tatap muka, telepon, atau melalui wawancara daring (online). Jawaban narasumber dalam wawancara merupakan tanggapan atau respons dari narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jawaban ini mencerminkan pandangan, pengalaman, pengetahuan, dan perspektif narasumber terkait dengan topik atau masalah yang sedang dibahas dalam wawancara (Moleong, 2013). Jawaban narasumber sangat penting dalam penelitian kualitatif karena mereka membantu dalam memahami pandangan, persepsi, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian. Analisis jawaban ini dapat membantu peneliti dalam merumuskan

temuan, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian, dan membangun argumentasi atau narasi dalam laporan penelitian.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang sebelumnya telah dikumpulkan, disimpan, atau dibagikan oleh organisasi atau peneliti lain untuk tujuan lain. Para peneliti kemudian menggunakan data ini dalam penelitian mereka sendiri (Sugiyono, 2017). Data ini berasal dari sumber yang sudah ada dan bukan diperoleh melalui wawancara tertutup atau pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat ini. Artinya peneliti bertindak sebagai peneliti kedua karena data tidak diperoleh secara diam-diam. Data sekunder diperoleh dari penelitian, buku, jurnal, atau data-data yang berkaitan dengan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengambil sumber dari buku, artikel, jurnal, dan karya sastra lainnya yang mendukung analisis kritis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Pemerintahan Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi di mana satu pihak, yang disebut pewawancara, mengajukan serangkaian pertanyaan atau topik kepada pihak lain, yang disebut narasumber, untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau penjelasan tentang suatu masalah atau topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui wawancara daring (*online*), tergantung pada konteks dan tujuan wawancara (Moleong, 2013).

Wawancara dilakukan untuk menggali data yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti dapat mencari informasi dari beberapa informan diantaranya masyarakat umum, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, TPK desa, ketua BPD, ketua RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa Karang Sari.

#### 2) Dokumentasi

Pemanfaatan dokumentasi bertujuan untuk mencari informasi mengenai topik atau variabel tertentu, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. (Arikunto, 2006)

Dokumentasi yang dilakukan meliputi surat kinerja pemerintah, sertifikat penghargaan, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), merupakan sumber data yang sangat penting dalam penelitian tentang pengelolaan dana desa dan kepemimpinan perempuan di Desa Karang Sari. Dokumentasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemerintah desa mengelola dana desa dan bagaimana peran kepemimpinan perempuan dalam proses tersebut (Moleong, 2013).

Dokumen dapat menjadi sumber data yang penting dan relevan dalam berbagai jenis penelitian, termasuk penelitian ilmiah, penelitian sosial, penelitian bisnis, dan banyak lagi. Dokumen menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan temuan penelitian (Sarosa, 2012). Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang menyangkut dengan surat kinerja pemerintah, sertifikat penghargaan, RPJM dan APBDes di Desa Karang Sari.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, Analisis data dilakukan untuk memahami dan mendalaminya melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki tiga teknik analisis data yaitu:

##### **1) Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan informasi, fakta, atau fakta yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis dikenal dengan istilah pengumpulan data. Ini adalah salah satu tahapan terpenting dalam analisis data dan penelitian, dan tujuannya adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memenuhi tujuan analisis tertentu. Pengumpulan data harus dilakukan secara hati-hati, metodis, dan sesuai dengan metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh harus valid, akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian atau analisis. Selanjutnya, data tersebut akan digunakan dalam analisis dan interpretasi untuk mencapai temuan atau hasil yang signifikan sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis tersebut (Sugiyono, 2017).

##### **2) Reduksi Data**



Reduksi data adalah langkah dalam analisis data yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, memilih, dan fokus pada aspek-aspek yang paling penting atau relevan dari data, sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data atau informasi yang paling relevan dan signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini bisa berarti mengabaikan data yang kurang relevan atau sekunder, atau memilih fokus pada aspek tertentu dari data. (Sugiyono, 2017).

Proses reduksi data bertujuan untuk membuat data lebih mudah dikelola, dimengerti, dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola, tema, atau temuan yang muncul dari data, sehingga memudahkan penyusunan laporan penelitian atau presentasi hasil. Reduksi data biasanya dilakukan setelah pengumpulan data dan sebelum analisis lebih lanjut.

### 3) Display Data

*Display* data adalah cara untuk mengkomunikasikan informasi atau data kepada orang lain dengan menggunakan berbagai metode visual atau grafis. Tujuan utama dari display data adalah untuk membuat data lebih mudah dimengerti, dianalisis, dan diinterpretasikan oleh audiens yang berbeda, termasuk peneliti, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Penggunaan display data dalam penelitian memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi peneliti. *Display* data, seperti grafik dan diagram, memvisualisasikan data secara visual, membuatnya lebih mudah dimengerti oleh peneliti. Ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tren, dan anomali dengan lebih jelas. (Sugiyono, 2017).

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah penting dalam proses penelitian atau analisis data. Ini adalah tahap di mana peneliti atau analis membuat ringkasan dari temuan yang telah ditemukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian dan merumuskan hasil atau kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Kesimpulan dalam penelitian atau analisis data adalah titik akhir dari proses penelitian, tetapi juga dapat menjadi titik awal untuk penelitian atau tindakan lebih lanjut. Kesimpulan yang tepat dan informatif dapat memberikan nilai tambah kepada

penelitian dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti. (Sugiyono, 2017).

## 5. Validasi data Penelitian

Validitas dalam konteks penelitian atau pengumpulan data berkaitan dengan sejauh mana suatu instrumen atau metode pengumpulan data tertentu secara obyektif dan andal mendeteksi apa yang dilihat atau memberikan hasil yang valid. Validitas adalah sejauh mana suatu alat atau prosedur pengukuran tertentu dapat digunakan untuk mengukur secara akurat dan konsisten suatu variabel yang harus diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur secara akurat apa yang diukur atau variabel yang ingin diukur, sesuai dengan tujuan penelitian atau pengukuran (Arikunto, 2006).

Pengujian validitas data dalam penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi adalah pendekatan yang umum dan efektif untuk memastikan keabsahan dan validitas data. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber, metode, atau sudut pandang yang berbeda untuk mengonfirmasi atau memverifikasi temuan dan interpretasi dalam penelitian. Teknik triangulasi memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena atau variabel dari berbagai perspektif yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan validitas temuan (Moleong J. L., 2000). Denzin (dalam Moleong, 2002 ) menyatakan ada empat macam teknik triangulasi, yakni:

- 1) Triangulasi Metode: Triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa metode atau teknik pengumpulan data untuk menguji dan memvalidasi temuan penelitian. Contohnya, peneliti dapat mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengonfirmasi temuan yang sama dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi Sumber: Untuk memverifikasi hasil penelitian, triangulasi sumber memungkinkan penggunaan beberapa kumpulan data atau sumber informasi yang berbeda. Misalnya, peneliti dapat mengumpulkan data dari responden dengan karakteristik berbeda atau dari laporan dengan perspektif atau latar berbeda.
- 3) Teori Segitiga: Teori ini mendorong penerapan beberapa teori atau teori etika kerja guna menginterpretasikan data dan menjamin konsistensi antara data yang dikumpulkan dengan teori yang diterapkan.
- 4) Triangulasi Peneliti: Triangulasi Peneliti melibatkan beberapa peneliti atau tim peneliti yang bekerja sama secara kooperatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Hal ini dapat membantu mengurangi bias individual dan memastikan kesesuaian antara temuan dan interpretasi.

Penggunaan triangulasi sumber dalam penelitian merupakan pendekatan yang berguna untuk memverifikasi keabsahan dan validitas data dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Teknik ini membantu mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan memvalidasi data dari sudut pandang yang beragam. Triangulasi sumber yang digunakan meliputi:

- 1) Identifikasi Sumber: Langkah pertama dalam menggunakan triangulasi sumber adalah mengidentifikasi berbagai sumber data yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung atau memverifikasi temuan penelitian. Sumber data dapat berasal dari wawancara, observasi, dokumen, literatur, atau informasi dari subjek atau pihak yang terlibat.
- 2) Pengumpulan Data: Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber sesuai dengan metode yang dipilih. Misalnya, jika penelitian melibatkan wawancara, peneliti dapat melakukan wawancara dengan berbagai responden yang memiliki pengalaman atau perspektif yang berbeda terkait dengan topik penelitian.
- 3) Analisis Data: Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dari masing-masing sumber secara terpisah. Analisis data dapat melibatkan penggunaan teknik analisis kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.
- 4) Perbandingan dan Integrasi: Langkah berikutnya adalah membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber. Peneliti memeriksa kesamaan atau perbedaan dalam data dari sudut pandang yang berbeda, dan mencoba untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul secara konsisten di seluruh sumber.
- 5) Interpretasi dan Kesimpulan: Akhirnya, peneliti menginterpretasikan hasil dari triangulasi sumber dan menggunakan informasi yang diverifikasi untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang lebih kuat terkait dengan topik penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan penyelidikan, penyusunan, pengaturan, pemodelan, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna di dalamnya. Proses analisis data bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, terstruktur, dan dapat dipahami

secara signifikan dalam konteks penelitian atau studi yang sedang dilakukan. (Moleong, 2004).

Penelitian ini memiliki untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan di Desa Karangsari merupakan upaya untuk memahami dan menganalisis bagaimana fungsi kepemimpinan dilaksanakan di tingkat desa tersebut. Tahap analisis data dalam penelitian mengenai pelaksanaan kepemimpinan di Desa Karangsari dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa tahap analisis data yang dapat dilakukan dalam konteks penelitian ini:

1. Penyusunan Data: Langkah awal dalam tahap analisis data adalah penyusunan data yang telah dikumpulkan. Pastikan data tersedia dalam format yang terstruktur dan siap untuk dianalisis. Data dapat berasal dari wawancara, survei, observasi, dokumen resmi desa, atau sumber lainnya.
2. Pembersihan Data: Lakukan proses pembersihan data untuk mengidentifikasi dan menangani data yang hilang, tidak lengkap, atau tidak valid. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.
3. Pengkodean Data: Jika diperlukan, lakukan pengkodean data untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi kategori-kategori yang relevan dalam data. Pengkodean memudahkan analisis data dengan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur.
4. Analisis Deskriptif: Gunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan meringkas data secara statistik. Ini meliputi penghitungan statistik seperti mean, median, modus, dan deviasi standar untuk variabel-variabel yang relevan terkait pelaksanaan kepemimpinan.
5. Analisis Kualitatif: Jika data bersifat kualitatif (misalnya dari wawancara atau observasi), lakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori temuan yang muncul dari data tersebut. Ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti analisis konten atau analisis tematik.
6. Analisis Komparatif: Lakukan analisis komparatif untuk membandingkan data antara kelompok atau variabel yang berbeda terkait dengan pelaksanaan kepemimpinan. Misalnya, bandingkan persepsi atau pengalaman tentang kepemimpinan antara penduduk desa dan anggota pemerintahan desa.
7. Interpretasi Temuan: Setelah analisis dilakukan, interpretasikan temuan dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan analisis. Identifikasi

- pola atau tren penting, temukan hubungan antar variabel, dan diskusikan implikasi temuan tersebut dalam konteks kepemimpinan desa.
8. Verifikasi Temuan: Lakukan verifikasi temuan dengan melibatkan stakeholder atau pihak terkait untuk memastikan keabsahan dan relevansi hasil analisis.
  9. Penyajian Hasil: Terakhir, sajikan hasil analisis data dalam bentuk laporan atau presentasi yang jelas dan sistematis. Gunakan tabel, grafik, atau visualisasi lainnya untuk menyampaikan temuan secara efektif.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sistematika penulisan adalah cara struktural atau kerangka yang digunakan dalam menyusun sebuah dokumen atau tulisan. Sistematika ini membantu penulis untuk mengorganisasi informasi dengan baik, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi garis besar, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistem penulisan.

### **BAB II : PEREMPUAN KEPEMIMPINAN**

Bagian ini mencakup topik-topik umum seperti pemahaman dana desa pribadi, pemahaman Dana Desa, pemahaman kepemimpinan perempuan, dan dasar-dasar pertukaran keuangan.

### **BAB III: PROFIL KARANGSARI DAN IBU SUHARTINI KEPALA**

Desa Karang Sari, prioritas kegiatan, geografis, visi, misi, struktur organisasi pemerintahan, potensi dan sumber daya, mata pencaharian dan kerja, arah kebijakan keuangan desa, program kerja Desa Karang Sari, dan lembaga-lembaga desa Karang Sari berisi tentang sejarah. Selain itu profil dan biodata Ibu Suhartini.

### **BAB IV: STRATEGI SUHARTINI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Bagian ini membahas tentang temuan penelitian potret kepemimpinan Ibu Suhartini dalam memimpin Desa Karang Sari yang dinilai dengan *good corporate governance*.

### **BAB V : TIPE KEPEMIMPINAN SUHARTINI DALAM MENGELOLA DANA DESA**

Bab kelima membahas program-program yang bersifat responsif gender dalam kepemimpinan Ibu Suhartini.



## **BAB II**

### **KEPEMIMPINAN**

#### **A. KEPEMIMPINAN**

##### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Arti dari Kepemimpinan Robbins adalah proses dimana orang lahir, mempengaruhi, dan memotivasi dalam orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan orang-orang dalam organisasi atau kelompok untuk bekerja bersama-sama menuju visi atau tujuan bersama. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan kombinasi keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk menjadi agen perubahan atau penggerak dalam suatu konteks tertentu. Kepemimpinan melibatkan pengaruh, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Seorang pemimpin mampu membawa perubahan, menggerakkan orang lain, dan mengarahkan aktivitas menuju pencapaian tujuan bersama (Ghufron, 2020).

Pemimpin adalah individu yang mempunyai kemampuan memimpin, mempengaruhi, dan merendahkan orang lain atau sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan atau visi bersama. Pemimpin dapat muncul dalam beberapa konteks, seperti dalam organisasi, pemerintahan, komunitas, atau kehidupan sehari-hari. Setiap pemimpin memiliki keuntungan penting dalam mengekspresikan pendapatnya, memberikan arahan, menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi kerja sama di antara anggota kelompoknya. Peran seorang pemimpin tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan formal dalam hierarki organisasi, tetapi juga bisa terjadi dalam situasi informal di mana seseorang secara sukarela mengambil peran kepemimpinan. Karakteristik yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang efektif termasuk kepemimpinan yang berintegritas, kejujuran, empati, adaptabilitas, ketegasan, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Namun, pemimpin dapat memiliki berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, seperti kepemimpinan otoriter, kepemimpinan transaksional, atau kepemimpinan transformasional, tergantung pada situasi dan tujuan yang dihadapi (Mulyono, 2018).

Kepemimpinan yang baik dan berhasil adalah kemampuan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif, mencapai tujuan bersama, dan memotivasi orang-orang di sekitar pemimpin untuk berkinerja maksimal. Dilain sisi kepemimpinan yang buruk

seringkali melibatkan perilaku yang tidak jujur, tidak etis, atau tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. Hal ini dapat mengikis kepercayaan anggota tim (Hidayanto, 2005).

Seorang pemimpin menginspirasi pengikutnya dengan semangat kepemimpinan yang tegas dalam membuat kebijakan, lemah lembut ketika memberikan kritik kepada masyarakat, lebih bisa merangkul dan peduli, menampung aspirasi. Selain itu terdapat indikator-indikator kepemimpinan yang baik yaitu pengarahan yang baik dan terarah oleh pemimpin, komunikasi yang baik dan jelas, pengambilan keputusan yang tidak hanya melibatkan satu, dua orang saja, dan dapat memberikan motivasi.

## **2. Kriteria Kepemimpinan**

Pemimpin yang berhasil biasanya memiliki sejumlah kriteria atau karakteristik yang membedakannya dan membuatnya efektif dalam peran kepemimpinan. Kriteria-kriteria ini merupakan beberapa faktor yang dapat membantu mengidentifikasi pemimpin yang efektif dan sukses. Namun demikian, kepemimpinan adalah kombinasi unik dari berbagai karakteristik dan keterampilan yang berkembang seiring waktu dan pengalaman. Pemimpin yang berhasil terus mengasah dan memperkuat kriteria-kriteria ini untuk memimpin dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam organisasi atau lingkungan mereka.

Sifat kepribadian vitalis dan stamina fisik adalah dua karakteristik penting yang dapat mendukung keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan perannya dengan baik. Vitalitas dalam konteks kepemimpinan mengacu pada energi, semangat, dan kekuatan internal yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki vitalitas tinggi biasanya energik, antusias, dan penuh semangat. Mereka mampu menyulut motivasi dan semangat dalam tim atau organisasi. Pemimpin yang sehat secara fisik cenderung memiliki stamina yang lebih baik. Kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan produktif dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat ini akan lebih siap untuk menghadapi tugas-tugas kepemimpinan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi tim atau organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin yang berhasil memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dan membantu mereka mencapai tujuan secara efektif. Pemimpin yang berhasil memiliki visi yang jelas tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai. Mereka dapat mengkomunikasikan visi ini dengan cara yang inspiratif dan menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama.



Seorang pemimpin yang sukses memerlukan kesabaran tertentu, karena kepemimpinan yang kuat memerlukan banyak tanggung jawab untuk mempengaruhi, menghalangi, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang manajer harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Ini membutuhkan kecerdasan dalam menganalisis informasi, mengevaluasi risiko, dan memilih opsi terbaik untuk mencapai tujuan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, tegas, dan persuasif sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik mampu mengartikulasikan visi, memberikan arahan yang jelas, dan mendengarkan dengan baik untuk memahami perspektif orang lain.

Kriteria kepemimpinan dalam suatu organisasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan organisasi tersebut. Pemimpin yang berhasil mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim atau organisasi. Mereka mendorong kinerja tinggi, menghargai kontribusi individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memahami dan terlibat dengan anggota organisasi. Mereka mendengarkan dengan baik, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan bertindak dengan empati.

Kepemimpinan yang efektif mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan karyawan, tugas yang dilakukan, dan kebijakan organisasi. Kriteria kepemimpinan yang optimal juga dapat berubah seiring berjalannya waktu seiring dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Situasi ini meliputi churn karyawan, hubungan karyawan, ukuran organisasi, tugas, struktur, aturan, dan lain-lain. Dalam konteks yang beragam ini, kepemimpinan yang ideal biasanya mencakup kemampuan untuk beradaptasi, komunikasi yang efektif, kemampuan menginspirasi dan memotivasi tim, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kepemimpinan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi sering kali dianggap sebagai kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Tersapat dua faktor penting yang memengaruhi terbentuknya kepemimpinan yang efektif:

1. Faktor Internal: Ini mencakup karakteristik pribadi seorang pemimpin, seperti keterampilan komunikasi, integritas, kepercayaan diri, empati, dan kebijaksanaan. Faktor internal ini memainkan peran penting dalam kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain. Faktor Eksternal: Ini mencakup konteks atau situasi di mana kepemimpinan terjadi, seperti budaya

organisasi, tugas-tugas yang dihadapi, struktur organisasi, dan dinamika tim. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor eksternal tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat percaya diri yang harus dimiliki seorang pemimpin dan menjadi syarat kepemimpinan.

## **B. Kepemimpinan Perempuan**

Pemimpin perempuan seringkali menghadapi sejumlah tantangan unik dalam perjalanan mereka menuju kepemimpinan yang sukses. Meskipun semakin banyak perempuan yang mencapai posisi-posisi kepemimpinan tingkat tinggi di berbagai bidang, masih ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan. Stereotip gender yang melekat dalam masyarakat dapat memengaruhi persepsi terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan. Pemimpin perempuan mungkin harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri mereka dan mengatasi prasangka ini. Kepemimpinan perempuan yang berhasil memberikan teladan bagi perempuan lainnya, mendorong mereka untuk mengambil inisiatif, meningkatkan kepercayaan diri, dan memahami potensi mereka. Ini dapat berkontribusi pada pemberdayaan perempuan secara lebih luas (Handayani & Novianto, 2014).

Kepemimpinan perempuan yang berhasil dapat mengukur dampak mereka dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam organisasi atau masyarakat. Ini bisa mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan atau pengurangan disparitas gender. Bersamaan dengan gerakan emansipasi dan kesetaraan gender yang pada akhirnya bertujuan untuk menonjolkan kesetaraan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Gaya kepemimpinan yang komprehensif dan atribut positif lainnya membuat mereka lebih siap untuk memangku posisi kepemimpinan. (Sumartini, 2021).

Peneliti memilih kepemimpinan perempuan dikarenakan lokasi penelitian pada Desa Karang Sari memiliki pemimpin perempuan yang sukses membangun dan memimpin desa. Konsep gender mengacu pada peran, identitas, perilaku, dan norma sosial yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin (gender) mereka. Konsep gender mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya atau masyarakat, serta bagaimana perbedaan gender ini memengaruhi kehidupan sehari-hari, hak, tanggung jawab, dan harapan individu (Fakih,

2003). Konsep gender yang memandang bahwa perempuan seharusnya mengambil peran domestik atau memiliki peran yang terbatas di dunia pekerjaan dapat membatasi peluang karier perempuan. Mereka mungkin mengalami hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan tingkat tinggi.

Menurut Rivai (2011: 122) Terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi bawahan dan membantu mencapai tujuan organisasi:

1. Pengertian Otoriter: Pengertian mengambil keputusan dengan segera tanpa berkonsultasi dengan bawahan. Ini efektif dalam situasi canggung atau ketika diperlukan pengambilan keputusan yang cepat, tetapi dapat mengurangi motivasi bawahan dalam jangka panjang.
2. Pemimpin Demokratisme: Pemimpin yang melibatkan proses pengambilan keputusan. Hal ini mendorong partisipasi, kreativitas, dan keterlibatan tim, meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil akhir.
3. Kepemimpinan Laissez-faire: Pemimpin memberikan otonomi yang besar kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Ini cocok untuk tim yang terampil dan mandiri, tetapi dapat menyebabkan kebingungan atau kekurangan arah dalam tim yang membutuhkan bimbingan lebih jelas.
4. Kepemimpinan Transformasional: Pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius, seringkali dengan mengartikulasikan visi yang jelas dan memperkuat nilai-nilai organisasi.
5. Kepemimpinan Situasional: Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi, seperti mengadopsi pendekatan yang lebih otoriter dalam situasi darurat atau lebih demokratis dalam situasi yang membutuhkan kolaborasi..

### **C. Good Governance**

Pemberian dana yang besar kepada desa memang membutuhkan good governance atau tata kelola yang baik. Hal ini karena dana tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

(Oktaresa, 2015).

Good governance didefinisikan sebagai praktik-praktik dan proses-proses yang memastikan pengambilan keputusan yang terbuka, transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, efisien, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu di tingkat pemerintahan lokal, nasional, maupun internasional (BPKB, 2015). UNDP

mengemukakan bahwa karakteristik *good governance* melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan ciri tersebut, kesembilannya cukup kuat dan tidak serta merta berdiri sendiri. Menurut peraturan pemerintah, *good governance* seringkali diartikan sebagai praktik-praktik dan proses-proses yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas..

Mewujudkan *good governance* memang merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan suatu negara atau organisasi. *Good governance* menciptakan kerangka kerja yang memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Toksoz, 2008).

Stewardship theory maupun agency theory adalah dua teori yang sering dikaitkan dengan konsep *good governance*:

**Stewardship Theory:** Teori ini menekankan pada konsep bahwa pemimpin atau pengelola organisasi bertindak sebagai wakil atau "pengelola" (steward) atas kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya. Menurut teori ini, pemimpin yang efektif akan berusaha untuk mengelola organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dari semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Stewardship theory menekankan pada pentingnya integritas, kepercayaan, dan komitmen pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan memprioritaskan kepentingan pemangku kepentingan.

**Agency Theory:** Teori ini lebih fokus pada hubungan antara pemilik dan agen (manajer atau pemimpin) yang dipekerjakan untuk mengelola aset atau kepentingan mereka. Menurut *agency theory*, ada potensi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri daripada kepentingan pemilik. Dalam konteks *good governance*, *agency theory* menyoroti pentingnya pembuatan kontrak yang jelas, pengawasan yang efektif, dan insentif yang sesuai untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Pemberian dana ke desa merupakan salah satu kebijakan atau program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di tingkat lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat pemerataan pembangunan. Dana yang diberikan dapat berasal dari sumber-sumber seperti anggaran pemerintah pusat, dana otonomi khusus, atau sumber-sumber lainnya (Rizka, 2017).

*Good governance* adalah sebuah konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik tata kelola atau pemerintahan yang baik dalam suatu organisasi, lembaga, atau pemerintahan (Mardiasmo, 2014). Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, keadilan, dan kebijakan yang berfokus pada kepentingan publik. *Good governance* adalah landasan penting bagi tata kelola yang efektif dalam berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintahan yang menjadi agen perubahan adalah pemerintahan yang memiliki peran aktif dalam menginisiasi, mendorong, dan mengimplementasikan perubahan positif dalam masyarakat dan negara. Pemerintahan semacam ini tidak hanya memainkan peran administratif atau pengelolaan rutin, tetapi juga berusaha untuk menciptakan perbaikan dan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah berfokus pada pengembangan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah menggunakan bukti ilmiah dan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Berikut adalah karakteristik pelaksanaan *Good Governance* menurut UNDP dan Mardiasmo (2014):

1. Partisipasi (*participation*).

Menurut UNDP, partisipatif berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan pernyataan serta kemampuan masyarakat untuk bersatu dan kooperatif. Sedangkan pengertian tindakan partisipatif menurut Mardiasmo (2014) adalah melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pemanfaatan desa. Alokasi anggaran desa adalah sumber daya yang diberikan pemerintah kepada desa untuk memodifikasi program dan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan tingkat pembangunan dan kesejahteraan desa.

Partisipasi dalam pengelolaan dana desa penting karena melibatkan penduduk desa secara langsung dalam menentukan prioritas dan kebutuhan mereka.

Keuntungan partisipasi dalam pengelolaan dana desa adalah meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Selain itu,

partisipasi juga dapat meningkatkan penguatan masyarakat lokal dan rasa memiliki terhadap proyek dan program pembangunan yang sedang berlangsung di desa mereka.

## 2. Supremasi hukum (*rule of law*).

Supremasi hukum menurut Mardiasmo (2014) adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segala hal dan setiap orang, termasuk penguasa pemerintahan, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan dana desa, supremasi hukum sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka memastikan supremasi hukum dalam pengelolaan dana desa, pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama untuk membangun sistem pengelolaan yang kuat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana desa juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal.

## 3. Transparan (*transparency*)

Transparansi menurut UNDP yaitu adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga gampang diketahui oleh masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2014) yaitu transparansi (*transparency*) pada pengelolaan dana desa mengacu pada keterbukaan dan keterangkasan informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa dapat dipahami dan diawasi dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk warga desa, pihak pemerintah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa membantu menciptakan lingkungan yang akuntabel, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, transparansi juga merupakan kunci bagi efisiensi dan keberhasilan program pembangunan yang didanai oleh dana desa.

## 4. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas (*responsiveness*) dalam pengelolaan dana desa mengacu pada kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk merespons kebutuhan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat desa dengan cepat dan efektif. Prinsip responsivitas

menekankan pentingnya mendengarkan dan merespons secara aktif permasalahan dan harapan dari masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa.

Dengan menerapkan responsivitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa lebih berdampak positif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, responsivitas juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan di tingkat desa.

#### 5. Konsensus orientasi (*consensus of orientation*)

Menurut UNDP, orientasi konsensus adalah kelompok kerja yang bertujuan untuk mencapai usaha patungan. Menurut Maediasmo (2014), konsensus orientasi, atau kesepakatan di antara banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan desa, merupakan faktor penting dalam pengelolaan desa. Prinsip orientasi konsensus menekankan pentingnya mencapai tujuan bersama antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan desa.

Mencapai konsensus mengenai arah dapat membuat pengelolaan utang desa menjadi lebih efektif dan sejalan dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Selain itu, orientasi konsensus juga dapat meningkatkan rasa pemberdayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap proyek dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

#### 6. Keadilan (*equity*)

Menurut UNDP Keadilan (keadilan), hal ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam dunia usaha untuk meningkatkan standar hidup. Sedangkan menurut Mardiasmo (2014) keadilan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam alokasi dan penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan mencapai seluruh warga desa secara adil, tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau kelompok sosial lainnya. Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa masyarakat desa yang lebih rentan dan marginal terlayani dengan baik dan mendapatkan akses yang sama terhadap peluang pembangunan.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat lebih inklusif dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat lokal.

## 7. Efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*)

Sesuai dengan Efisiensi dan Efektivitas UNDP, seluruh proses dan organisasi yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan persediaan yang tersedia dipertimbangkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2014), efisiensi mengacu pada kemampuan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Saat menjual inventaris desa, efisiensi adalah menjual dan menggunakan inventaris desa secara tepat waktu dan hemat biaya. Hal ini mencakup mengurangi pemborosan, menghindari birokrasi berlebihan, dan meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan proyek dan program yang didanai oleh dana desa. Ketika efisiensi diterapkan dalam pengelolaan dana desa, lebih banyak hasil dapat dicapai dengan menggunakan jumlah dana yang sama atau bahkan lebih sedikit.

Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan dana desa, efektivitas berarti proyek dan program yang didanai harus berhasil mencapai hasil yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Hal ini mencakup aspek kualitas, dampak, dan keberhasilan dari pelaksanaan proyek dan program tersebut. Ketika efektivitas diterapkan dalam pengelolaan dana desa, proyek dan program akan memberikan kontribusi positif dan nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## 8. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut UNDP, tanggung jawab, atau kemampuan mengkomunikasikan keyakinan seseorang kepada masyarakat umum sesuai dengan keyakinan yang telah dikembangkan sebelumnya, merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Sebaliknya menurut Mardiasmo (2014), akuntabilitas di bidang desa dan pengelolaan mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban para pihak tersebut di bidang desa dan pengelolaan tersebut untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Prinsip akuntabilitas menuntut transparansi, integritas, dan keterbukaan dalam penggunaan dana desa serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Dengan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah dan lembaga terkait akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat desa. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan organisasi terkait serta menciptakan



transparansi, efisiensi, dan efektivitas lingkungan sekitar dalam pembangunan tingkat desa.

#### 9. Visi strategis (*strategic vision*)

Menurut UNDP Visi strategis (*strategic vision*) yaitu pemimpin dengan visi strategis melihat masa depan organisasi dalam jangka panjang. Pemimpin dengan visi strategis memiliki pandangan yang melebihi tujuan-tujuan sehari-hari dan tahunan, dan mereka memiliki gagasan yang jelas tentang di mana organisasi akan berada dalam beberapa tahun mendatang.. Sedangkan menurut Mardiasmo (2014) Visi strategis dalam pengelolaan dana desa merujuk pada arah jangka panjang yang diinginkan untuk pembangunan dan kemajuan desa. Ini mencakup rencana jangka panjang yang komprehensif dan berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Visi strategis adalah fondasi bagi perencanaan dan pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan langsung oleh kepala desa merupakan praktik yang umum terjadi di beberapa negara, terutama di wilayah pedesaan. Dalam beberapa kasus, kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dana desa, terutama dalam hal alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Bursa Desa Keuangan, pertukaran mata uang Desa diatur dengan hati-hati untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaannya. Maksud dari ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut di atas adalah untuk menjamin pengelolaan dana daerah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah. jumlah penduduk distrik tersebut.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki peran penting dalam pembuatan laporan dana desa. Namun, dalam praktiknya, proses pembuatan laporan dana desa melibatkan beberapa tahapan dan pihak terkait.. Kepala desa atau staf yang ditunjuk untuk mengelola keuangan desa mengumpulkan data dan dokumen terkait penggunaan dana desa, seperti bukti transaksi, kwitansi, dan faktur.

Visi strategis dalam pengelolaan dana desa adalah landasan untuk menyatukan upaya semua pihak yang terlibat menuju pembangunan yang berarti dan berkelanjutan

di tingkat desa. Dengan visi yang jelas dan terarah, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih terfokus, efektif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.

### **BAB III**

#### **PROFIL DESA DAN KEPALA DESA KARANGSARI**

##### **A. Profil Desa Karang Sari**

###### **6. Kondisi Geografis Desa Karang Sari**

Desa Karang Sari menurut data dari statistik Hasil

Penelitian lapangan tahun 2014 menggunakan GPS altimeter berlokasi pada LONG 110,89806 o E (BT, atau timing mark) dan RAT 07,13255 o S (LS, atau longitude) dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Katekan Kecamatan Brati
- b. Sebelah Timur : Desa tirem, Desa Lemah Putih, Desa Menduran
- c. Sebelah Selatan : Kali Lusi
- d. Sebelah Barat : Desa Kronggen, Desa Katekan Kecamatan Brati

Luas Wilayah Desa Karang Sari Seluas 502 Ha, yang terdiri dari :

- a. Sawah :360 Ha
- b. Tanah bukan Sawah :
  - ❖ Pekarangan :85 ha
  - ❖ Tegal :41 ha
  - ❖ Tambak/Kolam :-
  - ❖ Hutan :10 ha
  - ❖ Lainnya :6 ha

Berdasarkan topografinya, Desa Karang Sari mempunyai keunikan wilayahnya yang dapat diamati secara detail dibandingkan desa lainnya. Letaknya di ambang pengenceran antara 40 m dan laut. Tipe iklim yang terdapat di Desa Karang Sari adalah Tropis, dengan suhu maksimum 33 oC dan suhu minimum 30 oC. Karena wilayah lain di Indonesia mempunyai dua jenis kerang utama, yaitu penghujan dan kemarau, hal ini berdampak negatif jangka panjang terhadap jumlah tanam yang ada di Desa Karang Sari Kecamatan Brati.

Adapun Desa Karang Sari secara administratif terdiri dari 6 dusun dengan jumlah RW sebanyak 7 dan jumlah RT sebanyak 27. sebagaimana berikut :

- a. Dusun Karang Sari : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
- b. Dusun Mangonan Pokol : 2 RW dan 8 lingkungan RT.
- c. Dusun Panjuran : 1 RW dan 5 lingkungan RT.
- d. Dusun Sawit : 1 RW dan 3 lingkungan RT.

- e. Dusun Jabing : 1 RW dan 3 lingkungan RT.
- f. Dusun Lembono, Pulorejo, dan Pesantren : 1 RW dan 5 lingkungan RT.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karang Sari diperkirakan berjumlah 5.630 jiwa, terdiri dari 2.839 jiwa lajang dan 2.791 jiwa menikah. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata adalah 0,76 persen dalam tiga tahun terakhir. Kepadatan penduduk Desa Karang Sari kurang lebih 1309 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan penyebaran subjek perdusun sebagai berikut:

**Jumlah Penduduk Desa Karang Sari Per Dusun**

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki-laki	Perempuan	Total
Karangsari	314	453	461	914
Panjunan	484	560	553	1113
Jabing	265	351	365	716
Sawit	242	359	339	698
Mangonan	431	583	575	1158
Pokol	57	82	78	160
Lembono	91	131	121	252
Pulorejo	126	176	162	338
Pesantren	58	82	78	160
Jumlah	1.988	2.777	2.732	5.509

Desa Karang Sari menurut letak geografisnya berada di Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Karang Sari terletak di dekat bagian depan pulau, diam-diam melawan Desa Tirem. Di sisi lain, wilayah sebelah lainnya diam-diam berselisih dengan Desa Kronggen. Jika jalur selatan menghubungkan ke Desa Lemahputih, jembatan ini berguna untuk menjembatani masing-masing desa secara individual sehingga diperoleh informasi yang lebih akurat.

Di Kabupaten Grobogan, terdapat sarana dan prasarana yang luas di desa Karang Sari kecamatan Brati. Secara keseluruhan kondisi Desa Karang Sari dapat dikatakan cukup baik sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan

kegiatan pariwisata. Karena letak desa Karang Sari, jalur utama transportasi terletak di dekat kota Kudus. Masyarakat yang tinggal di Desa Karang Sari juga menggunakan jaringan listrik dan alat komunikasi untuk memantau kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap warga Desa mempunyai akses terhadap media komunikasi dan informasi seperti telepon genggam, televisi, dan internet.

Keunggulan Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan adalah memiliki fasilitas pendidikan baru yang dibuka pada November 2020 dan dikenal sebagai geopark yang terletak di pinggir desa. Lembar kerja ini ideal untuk membantu anak-anak belajar bagaimana mengekspresikan emosi mereka secara lebih penuh. Wifi ini biasanya cukup populer di kalangan pengguna, baik itu pada jam sekolah biasa maupun sepulang sekolah.

Status sosial ekonomi masyarakat Desa Karang Sari Mayoritas warga Desa Karang Sari berprofesi sebagai petani. Para petani di Desa Karang Sari tidak hanya menanam sayuran; mereka juga menanam tanaman lain termasuk bawang merah, jagung, dan tanaman palawija. Terdapat beberapa industri di Desa Karang Sari, seperti produksi batu bata, sablon, dan kerupuk. Beberapa warangaya di Desa Karang Sari memulai usaha ini karena merupakan salah satu industri utama di Desa Karang Sari Kecamatan Brati.

**Peta Desa Karang Sari**



### 3. Kondisi Sosial ekonomi penduduk

Warga Desa Karang Sari bangga menjadi petani. Warga Desa Karang Sari tidak hanya membuat sayuran saja, namun mereka juga membuat beberapa jenis buah-buahan, sayuran, dan belukar. Beberapa industri seperti produksi batu bata, sablon, dan kerupuk hadir di Desa Karang Sari. Beberapa warangay di Desa Karang Sari terlibat dalam usaha ini karena mereka mewakili salah satu industri utama di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

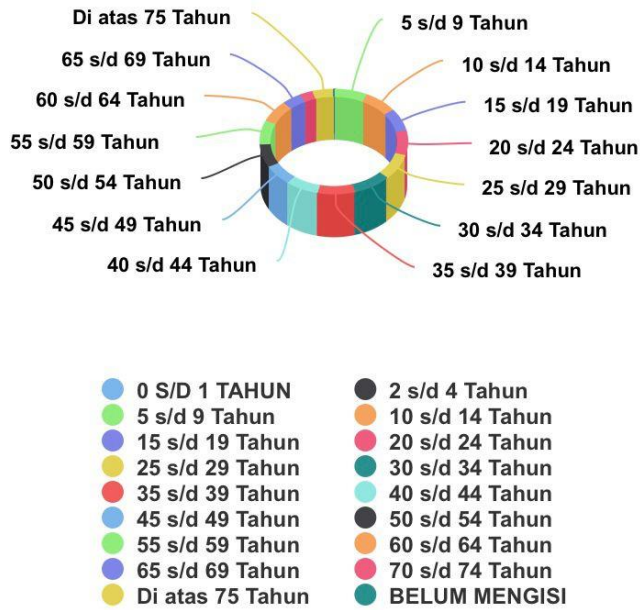
### 4. Acara-acara keagamaan di Desa Karang Sari

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Karang Sari menganut agama Islam. Di Desa Karang Sari, banyak terjadi tumpang tindih dengan persoalan keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa Taman Belajar Al-Qur'an (TPQ) yang dibuka setiap hari Jumat. Hal ini berdampak signifikan terhadap karakteristik keyakinan agama masyarakat di wilayah tersebut.

Banyak sekali agenda acara sosial keagamaan yang dilakukan di desa ini, diantaranya yaitu:

- a) Tahlilan dan Yasinan ialah kegiatan pembacaan kalimat thoyyibah dan pembacaan surah yasin yang dilakukan oleh masyarakat setiap Kamis malam Jumat.
- b) Arisan ialah kegiatan arisan ini dilakukan setelah pembacaan tahlilan dan yasinan secara rutin setiap malam Jum'at pahing.
- c) Sholawat dan barzanji ialah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Karang Sari secara rutin pada hari Ahad malam Senin.
- d) Waqiah ialah kegiatan membaca surah al-waqiah yang dilakukan masyarakat Desa Karang Sari pada malam Jum'at Pon setelah pembacaan tahlil dan yasin.

## 5. Data Penduduk berdasarkan Umur

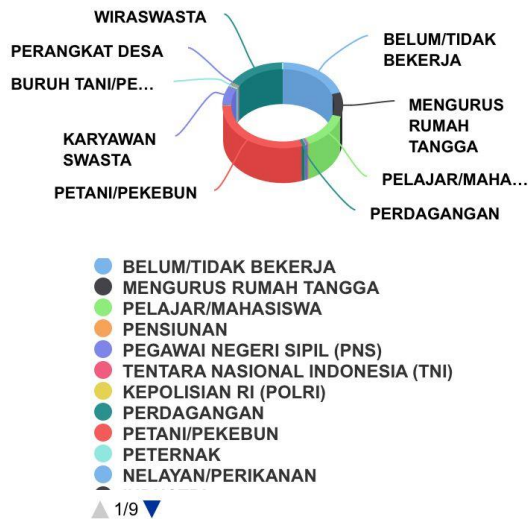


Tabel data penduduk berdasarkan umur

Kode	Kelompok	Jumlah	
		n	%
1	0 s/d 1 Tahun	10	0,00%
2	2 s/d 4 Tahun	6	0,00%
3	5 s/d 9 Tahun	412	0,00%
4	10 s/d 14 Tahun	413	0,00%
5	15 s/d 19 Tahun	392	0,00%
6	20 s/d 24 Tahun	425	0,00%
7	25 s/d 29 Tahun	446	0,00%
8	30 s/d 34 Tahun	459	0,00%
9	35 s/d 39 Tahun	461	0,00%
10	40 s/d 44 Tahun	404	0,00%
11	45 s/d 49 Tahun	360	0,00%
12	50 s/d 54 Tahun	399	0,00%
13	55 s/d 59 Tahun	414	0,00%
14	60 s/d 64 Tahun	376	0,00%
15	65 s/d 69 Tahun	239	0,00%
16	70 s/d 74 Tahun	162	0,00%
17	Di atas 75 Tahun	252	0,00%

	JUMLAH	5630	0,00%
	BELUM MENGISI	0	0,00%
	TOTAL	5630	0,00%

6. Data penduduk berdasarkan pekerjaan



Tabel data penduduk berdasarkan pekerjaan

Kode	Kelompok	Jumlah	
		n	%
1	Belum/ tidak bekerja	1146	0,00%
2	Mengurus rumah tangga	516	0,00%
3	Pelajar/mahasiswa	751	0,00%
4	Pensiunan	18	0,00%
5	Pegawai negeri sipil (PNS)	38	0,00%
6	Tentara nasional indonesia (TNI)	2	0,00%
7	Kepolisian RI (POLRI)	7	0,00%
8	Perdagangan	48	0,00%
9	Petani/pekebun	1706	0,00%
10	Peternak	15	0,00%
12	Industri	6	0,00%
13	Konstruksi	1	0,00%
14	Transportasi	2	0,00%
15	Karyawan swasta	390	0,00%



18	Karyawan honorer	3	0,00%
19	Buruh harian lepas	5	0,00%
20	Buruh tani/perkebunan	39	0,00%
22	Buruh peternakan	1	0,00%
23	Prmbantu rumah tangga	1	0,00%
26	Tukang batu	2	0,00%
30	Tukang jahit	1	0,00%
32	Penata rias	1	0,00%
45	Ustadz	1	0,00%
65	Guru	10	0,00%
68	Notaris	1	0,00%
72	Dokter	1	0,00%
73	Bidan	2	0,00%
74	Perawat	10	0,00%
79	Pelaut	1	0,00%
81	Sopir	3	0,00%
84	Pedagang	6	0,00%
85	Perangkat desa	15	0,00%
86	Kepala desa	1	0,00%
88	Wiraswasta	880	0,00%
	Jumlah	5630	0,00%
	Belum mengisi	0	0,00%
	Total	5630	0,00%

7. Data penduduk berdasarkan status perkawinan



Tabel data penduduk berdasarkan status perkawinan

Kode	Kelompok	Jumlah	
		n	%
1	Belum kawin	2114	0,00%
2	Kawin	3093	0,00%
3	Cerai hidup	145	0,00%
4	Cerai mati	278	0,00%
	Jumlah	5630	0,00%
	Belum mengisi	0	0,00%
	Total	5630	0,00%

## B. Profil Kepala Desa Karang Sari Suhartini

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan yaitu Suhartini. Suhartini lahir pada tanggal 12 Oktober 1966 di Desa Karang Sari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Suhartini anak keenam dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Sumardi asli Grobogan dan Ibunya bernama Ngasi juga asli Grobogan. Ayahnya yang juga aktif dibidang Politik sedangkan Ibunya sebagai Ibu rumah tangga. Namun bapaknya meninggal dunia ketika Suhartini berusia dua tahun, sehingga ibunya harus bekerja dengan menjual sayuran dan beras di desanya. Suhartini sendiri adalah adik dari Bupati Grobogan yaitu Sri Sumarni.

### 1. Jenjang Pendidikan yang sudah dilalui Suhartini

Suhartini memulai pendidikan formalnya pada tahun 1973 di sekolah dasar SDN 1 Karang Sari dan menyelesaikannya pada tahun 1979. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar satu kilometer melalui sepasang trotoar. Setelah tamat SD, Suhartini melanjutkan pendidikannya di SLTP/SMP pada tahun 1979 di SLTP/SMPN 1 Grobogan dan di Tamat pada tahun 1980. Jalan kaki yang diukur dari rumah ke sekolah adalah sekitar tiga kilometer sambil mengikuti jalan setapak. Setelah tiga tahun menempuh pendidikan SLTP/SMP, Suhartini melanjutkan pendidikan SLTA/SMA pada tahun 1980 di SLTA/SMAN 1 Purwodadi dan tamat pada tahun 1983. Jarak jalan kaki yang diukur dari rumah menuju sekolah adalah sekitar 4 kilometer sambil mengikuti jalan setapak. Setelah tiga tahun menempuh pendidikan SLTA/SMA.

## 2. Pengalaman Organisasi Suhartini

Setelah lulus SMA, Suhartini tidak melanjutkan lagi pendidikan ke perguruan tinggi universitas. Suhartini lebih aktif di koperasi Desa, UMKM, aktivis politik, aktif dalam pelayanan gereja sebagai majelis . Partai yang diikuti Suhartini yaitu partai PDIP suhartini juga aktif Bawaslu di Jawa Tengah terutama di kabupaten Grobogan. Pada saat Suhartini aktif di koperasi Desa lalu tak lama kemudian Suhartini menikah pada tahun 1987 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang sekarang telah menjadi dokter keua-duanya. Yang pertama menjadi dokter bedah mulut lulusan Universitas Gajah Mada, dan yang anak kedua menjadi dokter spesialis penyakit dalam lulusan Universitas Airlangga.

## 3. Karir dan Prestasi Suhartini

Suhartini menjabat sebagai Kepala Desa karangsari sudah dua periode berturut-turut. Awal mula pada tahun 2013 Suhartini menyelonkan diri sebagai kepala Desa dan terpilih. Selanjutnya pada tahun 2019 Suhartini menyalonkan diri kembali dan terpilih sebagai Kepala Desa yang kedua periode sampai sekarang. Sebelum Suhartini menyalonkan diri menjadi Kepala Desa beliau hanya sebagai Ibu rumah tangga dan aktif dikoperasi Desa. Setelah terpilihnya menjadi kepala desa, Suhartini menjalankan salah satunya adalah menjalankan berbagai macam kebijakan untuk kepentingan masyarakat yaitu Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan melalui beberapa program yaitu pembagian BLT Dana Desa di Desa Karangsari, penyemprotan Fogging di Dusun Karangsari Desa Karangsari, Kepala Desa Karangsari berbagi kasih ke Penyandang Disabilitas, dll. Setelah dua periode menjadi kepala Desa prestasi yang dihasilkan Suhartini yaitu dapat menjadikan Desa Karangsari Peringkat satu se kabupaten pada tahun 2022.

## 4. Program Unggulan Suhartini

Selain itu ada juga program unggulan pemerintah Desa Karangsari yaitu program pompanisasi. Program pompanisasi ini dibuat karena 90% mayoritas Desa Karangsari adalah petani. Oleh karena itu, harus difikirkan bagaimana petani Desa Karangsari yang tadinya tanah tadah hujan dan yang panen padi itu hanya musim hujan baru bisa panen. Tetapi sejak ada program pompanisasi ini di Desa Karangsari sekarang satu tahun bisa panen padi dua kali. Dan bisa dipastikan dengan adanya program unggulan pompanisasi di Desa Karangsari untuk musim padi sekarang petani bisa meningkatkan hasil pendapatannya.

Program unggulan yang kedua yaitu wisata geopark yang ada di Desa Karang Sari. Adanya program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karang Sari yang awalnya banyak ibu-ibu, anak-anak muda di Desa menganggur dan setelah adanya program ini banyak yang bisa bekerja di tempat wisata tersebut seperti disediakan lapak untuk berjualan dan banyak diisi oleh ibu-ibu PKK dan untuk anak-anak muda dijadikan sebagai karyawan di wisata tersebut. Di lapak tersebut menjual berbagai jenis UMKM yang memasarkan hasil keterampilan cemilan, kerajinan tangan, dll. Dengan adanya program unggulan wisata geopark tersebut, Desa Karang Sari mempunyai BUMDes yang setiap tahun kira-kira bisa menghasilkan ratusan juta untuk pendapatan asli Desa.

## **BAB IV**

### **KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

#### **A. PENGELOLAAN DANA DESA**

Dana desa adalah alokasi anggaran oleh pemerintah yang diberikan untuk desa-desa, baik dari tingkat pusat ataupun daerah, untuk mendukung pembangunan dan pelayanan dalam hal publik di tingkat desa. Dana atau anggaran ini bertujuan demi meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat desa, memperkuat infrastruktur, dan memfasilitasi pembangunan lokal.

Sumber dana desa dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bagian dari anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota, serta pendapatan desa sendiri dari pajak, retribusi, dan sumber dari pendapatan lainnya. Dana desa juga bisa berasal dari program-program atau proyek-proyek pemerintah yang ditujukan khusus untuk pembangunan di tingkat desa.

Pengelolaan pada anggaran dana desa di Karang Sari dilakukan dengan cara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Strategi perencanaan pembangunan desa merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mengarahkan dan mengelola pembangunan di tingkat desa. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat infrastruktur serta layanan publik di desa. Strategi perencanaan pembangunan desa harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi unik dari setiap desa, serta memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada. Dengan menerapkan strategi perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah desa dibentuk dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran yang penting

dalam menyediakan layanan dasar, memajukan pembangunan ekonomi dan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa.

Terdapat beberapa hal yang harus diselaraskan antara program desa dengan kebutuhan masyarakat. Selarasnya kegiatan pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pemerintah desa itu sendiri merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa. Berbagai hal perlu dipertimbangkan dan diselaraskan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Dalam strategi pengelolaan dana desa, kepala desa memerlukan beberapa hal sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang efektif:

**Pengetahuan tentang Peraturan dan Prosedur:** Kepala desa perlu memahami dengan baik peraturan dan prosedur yang mengatur pengelolaan dana desa, seperti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini penting agar kepala desa dapat mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari pelanggaran hukum.

**Kemampuan Manajemen Keuangan:** Kepala desa perlu memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, pembuatan laporan keuangan, dan pengendalian pengeluaran. Kemampuan ini akan membantu kepala desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa dengan efisien dan akuntabel.

**Transparansi dan Akuntabilitas:** Kepala desa harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa.

**Kepemimpinan yang Efektif:** Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa perlu memimpin dengan teladan dan integritas. Kepala desa harus mampu mengoordinasikan berbagai kegiatan terkait pengelolaan dana desa, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta membuat keputusan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Komunikasi yang Efektif:** Kepala desa perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat desa, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak eksternal lainnya. Komunikasi yang

baik akan memudahkan koordinasi dalam pengelolaan dana desa dan memperkuat kerjasama antarstakeholder.

Dengan persiapan yang matang dan kemampuan yang dinilai cukup memadai, kepala desa akan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dana desa dengan dan secara baik, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan anggaran desa yang efektif harus melibatkan seluruh masyarakat desa dan tidak hanya terbatas pada pejabat atau komunitas desa tertentu. Sosialisasi informasi kepada seluruh masyarakat desa tentang pemanfaatan anggaran desa merupakan langkah penting demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan mensosialisasikan informasi dalam penggunaan anggaran desa kepada seluruh masyarakat desa, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa, serta mendorong pertumbuhan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keuangan desa.

#### 1) Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana desa di Desa karangsari

Akuntabilitas (Accountability) diartikan sebagai bentuk suatu keharusan dalam kepemimpinan seseorang atau sebagai pejabat serta pelaksana bahwa tugas serta kewajibannya terjamin telah dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan ketentuan atau akuntabilitas yang bisa dilihat melalui laporan pertanggungjawaban yang informatif serta transparan.

Akuntabilitas publik juga diartikan sebagai suatu kewajiban pemegang amanah (agent) dalam beraktivitas dari suatu kegiatannya yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah untuk bisa memberikan suatu pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan dan melaporkan segala sesuatu yang dilakukan, (Mardiasmo, Akuntansi sektor publik, 2009) kemudian berkaitan dengan Tata Kelola Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Indikator akuntabilitas mengedepankan berkaitan dengan bagaimana Perencanaan realistis, Pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dan juga Bagaimana SDM yang berkompeten, professional dan bermoral itu, maka ini penulis menguraikan dari beberapa sub indikator di atas, yaitu:

##### a. Perencanaan Realistis, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban

Pengelolaan aloaksi dana desa dinilai sebagai suatu pendapatan yang ada dalam desa dan dimanfaatkan untuk hal dalam kemajuan desa terutama dalam hal pembangunan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 114 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pada perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berkala meliputi antara lain Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut (RPJM) diperkirakan dengan jangka waktu 6 tahun, serta rencana pembangunan yang berbasis tahunan disebut juga sebagai Rencana Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari maksud RPJM desa dengan kurun waktu satu tahun yang telah ditetapkan dalam peraturan desa, dalam penyusunan RPJM mengandung visi dan misi kepala desa, serta orientasi suatu kebijakan dalam pembangunan desa, dan rencana suatu kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintahan desa, implementasi dalam infrastruktur pembangunan, pembinaan kelompok masyarakat serta pemberdayaan dalam masyarakat di desa. Aturan yang tertera dalam Permendagri no 114 Tahun 2014 pada pasal 20 menjelaskan bagaimana penyusunan suatu rencana infrastruktur pembangunan dapat ditempuh melalui jalan musyawarah dalam desa. Pokok pada laporan pengkajian suatu keadaan pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak RT yang mengatakan :

*“Terkait dalam penyusunan RPJM Kampung dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung (Musrembang Kampung) dan apapun yang hubungannya dengan pemerintah desa kami selaku perangkat desa selalu memperhatikan dan mengikuti perUndangUndangan yang berlaku secara umum agar semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan dan dalam prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dengan demikian apapun yang dihasilkan dalam upaya perkembangan kampung dapat kami pertanggungjawabkan selain posisi BPK juga sangat penting karena BPK menandatangani dan menyetujui terkait apa yang dianggarkan oleh Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kegiatan perencanaan dalam tata kelola penggunaan ADD menyusun rencana partisipatif sekaligus menetapkan aloaksi anggarannya yang ditungkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Desa. Penyusunan di tetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa,



selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam peraturan kampung APB Desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari merupakan aspek yang dinilai penting yang harus ditekankan untuk menilai kepastian transparansi, integritas, dan efisiensi pada penggunaan dana desa. Desa Karang Sari merupakan salah-satu desa yang terletak di Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan mendapatkan bantuan yang bersumber dari pemerintah berupa dana yang disebut sebagai dana desa yang memang harus baik dalam pengelolaannya dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dengan manajemen yang baik maka akan menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian maka sifat percaya kelompok masyarakat akan timbul pada pemerintah desa dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana desa.

a) Kualitas kerja dan kedisiplinan

Kualitas kerja mengacu pada tingkat keunggulan atau standar hasil yang dihasilkan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Kualitas kerja mencakup berbagai hal seperti keakuratan, efisiensi, kreativitas, dan kesesuaian dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Seorang pekerja yang dinilai memiliki kualitas yang cukup tinggi cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih memuaskan. Kualitas kerja yang tinggi sering kali berkaitan erat dengan kedisiplinan yang baik. Orang yang disiplin cenderung memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas kerja mereka secara keseluruhan. Keduanya saling melengkapi dan menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Terkait wawancara tentang masalah kualitas kerja aparat desa, Kepala Desa Karang Sari mengungkapkan:

*“Puji Tuhan untuk kualitas kerja perangkat desa karangsari sudah sangat baik”*

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Suyatman (Sekretaris Desa Karang Sari) bahwa:

*“Berkaitan dengan kualitas kerja aparat desa sudah baik karena mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dalam hal respons terhadap kebutuhan dan keluhan warga, kemudahan dalam mengurus administrasi, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan kesediaan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat. Selain itu Karang Sari terkenal dengan pengelolaan dana desa terbaik dan merupakan desa taat hukum. kemudian mengenai dana desa di desa karangsari dalam setahun mentransfer 2 kali serta laporan keuangan selalu tepat waktu dibuat”.*

Pernyataan dari Bapak Suyatman diatas menunjukkan indikasi bahwa di Desa Karang Sari dari nilai kualitas terhadap kerja aparat desa dinilai sudah amat baik. Dengan demikian dapat dilihat tepat waktu dan akurat juga menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dari aparat desa. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana publik dengan baik. Kualitas keterampilan sekretaris desa sangat baik hal ini diwujudkan pada kemampuan untuk merencanakan kegiatan, menetapkan tujuan yang jelas, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan.

Hal senada juga disampaikan Bapak Gunawan, selaku Kepala Dusun Karang Sari menyatakan bahwa:

*"Ibu Lurah Tidak menganakemaskan Pegawai yang bekerja lebih baik daripada Pegawai yang Lainnya. Ibu Lurah selalu memperlakukan hal yang sama terhadap semua bawahannya, karena mereka mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Semisal bu Lurah berani menegur pegawai yang dianggap primadona dikantor, dan tidak membedakan semuanya dimata bu Lurah sama".*

Lebih lanjut Bapak Gunawan selaku Kepala Dusun menyampaikan bahwa:

*"Ibu Lurah memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkannya, sanksi tersebut berupa teguran. Misalnya sanksi terhadap pegawai yang terlambat datang atau pulang sebelum waktunya".*

Bapak Gunawan selaku Kepala Dusun juga menyampaikan bahwa:

*“Ibu Lurah selalu memberikan arahan berupa bimbingan tentang menerapkan metode kerja yang sesuai. Misalnya tentang bagaimana cara melakukan pelayanan publik yang baik dan benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah berusaha untuk meningkatkan agar pegawai dapat memiliki kompetensi kerja yang tinggi”.*

Selanjutnya oleh Bapak Lukman, selaku Warga Desa Karang Sari menyampaikan juga bahwa:

*"Yang saya tau Ibu Lurah selalu memberikan contoh yang baik kepada perangkat desa sebagai bentuk latihan kedisiplinan dengan datang tepat waktu di balai desa. Pagi-pagi sekali saya liat Ibu Lurah sudah berangkat ke kantor balai desa".*

Selain pernyataan diatas kualitas kerja Ibu suhartini tertip memberikan informasi dari mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa, serta pelaksanaan dalam hal pembangunan, pembinaan dalam kemasyarakatan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Informasi dalam hal penyelenggaraan suatu pemerintahan desa disampaikan secara tersurat Kurang lebih tiga bulan setelah akhir tahun, masyarakat sudah bisa mengakses media dengan mudah. Selain itu, Bupati juga membawahi Penyelenggaraan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berikut foto-foto APBDes Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2021:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:		
<b>1. Pendapatan Desa</b>		
1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	820.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	820.000.000,00
2. Transfer		
a. Semula	Rp	3.211.031.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.211.031.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	4.031.031.000,00
<b>2. Belanja Desa</b>		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1.187.292.305,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.187.292.305,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	1.789.789.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(34.200.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.755.589.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	38.957.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	38.957.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	1.800.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.800.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	127.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.200.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	161.200.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.144.838.305,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	886.192.695,00

<b>3. Pembiayaan Desa</b>			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	6.881.305,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp	6.881.305,00
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	893.074.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp	893.074.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan		Rp	(886.192.695,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Nomor : 05  
Tahun : 2021

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KARANGSAHARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>PENDAPATAN</b>							
4.1.	Pendapatan Asli Desa		820.000.000,00		820.000.000,00	0,00		
4.1.2	Hasil Asst Desa		820.000.000,00		820.000.000,00	0,00		
1.1.2.01.	Pengembalian Tanah Kas Desa		820.000.000,00		820.000.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer		3.211.031.000,00		3.211.031.000,00	0,00		
4.2.1.	Dana Desa		1.114.074.000,00		1.114.074.000,00	0,00		
1.2.1.01.	Dana Desa		1.114.074.000,00		1.114.074.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		47.173.000,00		47.173.000,00	0,00		
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		47.173.000,00		47.173.000,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		482.284.000,00		482.284.000,00	0,00		
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		482.284.000,00		482.284.000,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		1.567.500.000,00		1.567.500.000,00	0,00		
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		1.567.500.000,00		1.567.500.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00		
1.3.6.01.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.931.031.000,00</b>		<b>4.931.031.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	<b>BELANJA</b>							
1.1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1.187.292.105,00</b>		<b>1.212.192.305,00</b>	<b>24.900.000,00</b>		
1.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		<b>1.098.996.875,00</b>		<b>1.088.696.875,00</b>	<b>(38.300.000,00)</b>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Orang	48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	ADD	
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00		

Halaman 1

Printed by Siskaudes 27/06/2021 3:08:25 AM

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00		
1.1.01.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		39.000.000,00		39.000.000,00	0,00		
1.1.01.5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	13 Orang	356.000.000,00		351.700.000,00	(2.300.000,00)	ADD	
1.1.02.5.1.	Belanja Pegawai		356.000.000,00		351.700.000,00	(2.300.000,00)		
1.1.02.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		291.600.000,00		293.400.000,00	1.800.000,00		
1.1.02.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		291.600.000,00		293.400.000,00	1.800.000,00		
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		62.400.000,00		58.300.000,00	(4.100.000,00)		
1.1.02.5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		62.400.000,00		58.300.000,00	(4.100.000,00)		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	1 Tahun	104.819.875,00		104.819.875,00	0,00	ADD, PAD, PBI	
1.1.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa		104.819.875,00		104.819.875,00	0,00		
1.1.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		16.739.875,00		16.739.875,00	0,00		
1.1.04.5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		16.739.875,00		16.739.875,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		78.430.000,00		78.430.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		10.230.000,00		10.230.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		41.900.000,00		41.900.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan		10.600.000,00		10.600.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		650.000,00		650.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		650.000,00		650.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		
1.1.04.5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	9 Orang	25.920.000,00		25.920.000,00	0,00	PAD	
1.1.05.5.1.	Belanja Pegawai		25.920.000,00		25.920.000,00	0,00		
1.1.05.5.1.4.	Tunjangan BPD		25.920.000,00		25.920.000,00	0,00		

Halaman 2

Printed by Siskaudes 27/06/2021 3:08:25 AM

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.05	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD		25.920.000,00		25.920.000,00	0,00	
<b>f.1.08</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag</b>	1 Tahun	<b>7.538.000,00</b>	1 Tahun	<b>7.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD</b>
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa		4.641.500,00		4.641.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		<b>3.641.500,00</b>		<b>3.641.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.841.500,00		1.841.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.3	Belanja Modal		<b>2.897.500,00</b>		<b>2.897.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		<b>2.897.500,00</b>		<b>2.897.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer		2.897.500,00		2.897.500,00	0,00	
<b>f.1.07</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	34 Orang	<b>31.718.000,00</b>	34 Orang	<b>31.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD, PAD</b>
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa		31.718.000,00		31.718.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		<b>31.718.000,00</b>		<b>31.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		21.450.000,00		21.450.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.91	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		10.268.000,00		10.268.000,00	0,00	
<b>f.1.80</b>		<b>Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	15 Orang	<b>525.000.000,00</b>	15 Orang	<b>489.000.000,00</b>	<b>(36.000.000,00)</b>	<b>PAD</b>
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai		525.000.000,00		489.000.000,00	(36.000.000,00)	
1.1.90	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		<b>120.000.000,00</b>		<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.90	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		<b>405.000.000,00</b>		<b>369.000.000,00</b>	<b>(36.000.000,00)</b>	
1.1.90	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa		405.000.000,00		369.000.000,00	(36.000.000,00)	
				<b>36.314.430,00</b>		<b>36.314.430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>						
<b>f.2.01</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	1 Paket	<b>3.791.430,00</b>	1 Paket	<b>3.791.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DLL</b>
1.2.01	5.3	Belanja Modal		3.791.430,00		3.791.430,00	0,00	
1.2.01	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		<b>3.791.430,00</b>		<b>3.791.430,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.01	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer		3.791.430,00		3.791.430,00	0,00	
<b>f.2.03</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1 Paket	<b>32.523.000,00</b>	1 Paket	<b>32.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PBH</b>
1.2.03	5.3	Belanja Modal		32.523.000,00		32.523.000,00	0,00	

Halaman 3

Printed by Siskaudes 27/06/2021 3:08:25 AM

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.03	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		<b>32.523.000,00</b>		<b>32.523.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.03	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		32.523.000,00		32.523.000,00	0,00	
<b>1.3</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		<b>0,00</b>		<b>24.900.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	
<b>f.3.02</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	Paket	<b>0,00</b>	1 Paket	<b>24.900.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>DDS</b>
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		0,00		24.900.000,00	24.900.000,00	
1.3.02	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		0,00		<b>12.075.000,00</b>	<b>12.075.000,00</b>	
1.3.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		769.500,00	769.500,00	
1.3.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		0,00		9.257.500,00	9.257.500,00	
1.3.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		2.048.000,00	2.048.000,00	
1.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		0,00		<b>10.125.000,00</b>	<b>10.125.000,00</b>	
1.3.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		0,00		10.125.000,00	10.125.000,00	
1.3.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.3.02	5.2.7.91	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		0,00		2.700.000,00	2.700.000,00	
<b>1.4</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>		<b>40.431.000,00</b>		<b>78.484.000,00</b>	<b>38.053.000,00</b>	
<b>f.4.02</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musodus, rembeng desa Nor</b>	1 Tahun	<b>10.000.000,00</b>	1 Tahun	<b>12.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		12.300.000,00	2.300.000,00	
1.4.02	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		<b>4.250.000,00</b>		<b>6.550.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.4.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		2.300.000,00	2.300.000,00	
1.4.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		250.000,00		250.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		750.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.5.92	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
<b>f.4.10</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyiangan dan Penja</b>	1 Paket	<b>30.431.000,00</b>	1 Paket	<b>64.184.000,00</b>	<b>33.753.000,00</b>	<b>PAD</b>
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa		30.431.000,00		64.184.000,00	33.753.000,00	
1.4.10	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		30.431.000,00		64.184.000,00	33.753.000,00	

Halaman 4

Printed by Siskaudes 27/06/2021 3:08:25 AM



KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.10	5.2.5.01.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		30.431.000,00		64.164.000,00	33.753.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		13.550.000,00		15.797.000,00	2.247.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3 Bulan	13.550.000,00		15.797.000,00	2.247.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.550.000,00		15.797.000,00	2.247.000,00	
1.5.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		13.550.000,00		15.797.000,00	2.247.000,00	
1.5.06	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		13.550.000,00		15.797.000,00	2.247.000,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>1.789.789.000,00</b>		<b>1.736.689.000,00</b>	<b>(53.100.000,00)</b>	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		56.720.000,00		22.520.000,00	(34.200.000,00)	ADD, DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsta, Insentif)	1 Paket	56.720.000,00		22.520.000,00	(34.200.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		56.720.000,00		22.520.000,00	(34.200.000,00)	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.720.000,00		6.720.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		6.720.000,00		6.720.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		50.000.000,00		15.800.000,00	(34.200.000,00)	
2.2.02	5.2.7.91.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		50.000.000,00		15.800.000,00	(34.200.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.580.569.000,00		1.550.569.000,00	(30.000.000,00)	DDS
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Perit/Drain)	1 Paket	34.000.000,00		24.100.000,00	(9.900.000,00)	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		34.000.000,00		24.100.000,00	(9.900.000,00)	
2.3.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		34.000.000,00		24.100.000,00	(9.900.000,00)	
2.3.05	5.2.7.91.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		34.000.000,00		24.100.000,00	(9.900.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1 Paket	526.569.000,00		526.569.000,00	0,00	PAD, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal		526.569.000,00		526.569.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		526.569.000,00		526.569.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	1 Paket	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	PBP
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		1.000.000.000,00		600.000.000,00	(400.000.000,00)	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		1.000.000.000,00		600.000.000,00	(400.000.000,00)	
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		600.000.000,00		600.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Kil - Bahan Baku/Material		400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	

Printed by SisKeudeDes 27/09/2021 3:08:25 AM

Halaman 5

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		172.500.000,00		157.500.000,00	(15.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Lay	1 Paket	172.500.000,00		157.500.000,00	(15.000.000,00)	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		172.500.000,00		157.500.000,00	(15.000.000,00)	
2.4.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		172.500.000,00		157.500.000,00	(15.000.000,00)	
2.4.01	5.2.7.91.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		172.500.000,00		157.500.000,00	(15.000.000,00)	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>38.957.000,00</b>		<b>38.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
3.1.53		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Per	1 Tahun	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	PAD
3.1.53	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
3.1.53	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
3.1.53	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	PAD
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		27.957.000,00		27.957.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1 Kegiatan	5.150.000,00		5.150.000,00	0,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.150.000,00		5.150.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.150.000,00		5.150.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		5.150.000,00		5.150.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	17.807.000,00		17.807.000,00	0,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.107.000,00		12.107.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		5.107.000,00		5.107.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.707.000,00		2.707.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

Printed by SisKeudeDes 27/09/2021 3:08:25 AM

Halaman 6

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.03	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.3	Belanja Modal		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.9	Belanja Modal Lainnya		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
3.4.03	5.3.9.00	Belanja Modal Lainnya		5.700.000,00		5.700.000,00	0,00	
3.4.90		<b>Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)</b>	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	0,00	PBP
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.5.01	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2.92		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00	0,00	PAD
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
4.2.92	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
4.2.92	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		<b>127.000.000,00</b>		<b>181.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	
		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>89.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	
5.1		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1 Paket	55.000.000,00	1 Paket	89.200.000,00	34.200.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		55.000.000,00		89.200.000,00	34.200.000,00	
5.1.01	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		55.000.000,00		89.200.000,00	34.200.000,00	
5.1.01	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		<b>72.000.000,00</b>		<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3.01		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	30 KPM	72.000.000,00	30 KPM	72.000.000,00	0,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.144.838.305,00</b>		<b>3.144.838.305,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>886.192.695,00</b>		<b>886.192.695,00</b>	<b>0,00</b>	

Printed by Siskaudas 27/06/2021 3:08:25 AM

Halaman 7

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		6.881.305,00		6.881.305,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		6.881.305,00		6.881.305,00	0,00		
3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		6.881.305,00		6.881.305,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		893.074.000,00		893.074.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		893.074.000,00		893.074.000,00	0,00		
3.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa		893.074.000,00		893.074.000,00	0,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(886.192.695,00)</b>		<b>(886.192.695,00)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Mel 2021

PEMERINTAH DESA KARANGSARI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			4.031.031.000,00			4.031.031.000,00	0,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			820.000.000,00			820.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			820.000.000,00			820.000.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			820.000.000,00			820.000.000,00	0,00
	01. Sewa Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2021	PAD	1 Tahun	295.000.000,00	295.000.000,00	1 Tahun	331.000.000,00	36.000.000,00
	02. Tambahan Eks Bengkok Kepala Desa & Perangkat Des	PAD	1 Tahun	525.000.000,00	525.000.000,00	1 Tahun	489.000.000,00	(36.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer			3.211.031.000,00			3.211.031.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa			1.114.074.000,00			1.114.074.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.114.074.000,00			1.114.074.000,00	0,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.114.074.000,00	1.114.074.000,00	1 Tahun	1.114.074.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			47.173.000,00			47.173.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			47.173.000,00			47.173.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	47.173.000,00	47.173.000,00	1 Tahun	47.173.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			482.284.000,00			482.284.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			482.284.000,00			482.284.000,00	0,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	482.284.000,00	482.284.000,00	1 Tahun	482.284.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			1.567.500.000,00			1.567.500.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			1.567.500.000,00			1.567.500.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Tahun	1.567.500.000,00	1.567.500.000,00	1 Tahun	1.567.500.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00			0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00			0,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00			0,00	0,00
	01. Bunga Bank Tahun 2021	DLL	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00

PEMERINTAH DESA KARANGSARI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENDAPATAN			4.031.031.000,00			4.031.031.000,00	0,00

Karang Sari, Mei 2021

Kepala Desa  
Suhartini

SUYATMAN

b) Kepuasan Masyarakat menggunakan layanan pemerintah

Kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah adalah indikator penting untuk menilai efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat desa. Semakin baik pemerintahan, maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik menekankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memantau dan memahami bagaimana kebijakan dibuat dan dana publik digunakan. Hal ini menciptakan rasa akuntabilitas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Karang Sari Ibu Suhartini, bahwa:

*“Ketika berbicara berkaitan dengan kepuasan masyarakat sampai saat ini tidak ada pengukuran pada setiap individu, akan tetapi sejauh saya memimpin semua masyarakat mendukung program saya dan tidak melakukan protes atas kebijakan saya.”*



Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lastri Selaku masyarakat bahwa:

*“Alhamdulillah untuk pelayanan yang diberikan pemerintah desa sudah cukup puas”*

Sejalan dengan pernyataan Bapak Rasiman juga bahwa:

*“Pelayanan yang diberikan pemerintah desa sudah bagus untuk masyarakat desa. Semua perangkat desa diikutsertakan dalam program dan kebijakan yang akan dirumuskan guna membangun desa Karang Sari menjadi lebih baik.”*

Mengacu pada hal tersebut dapat ditarik simpulan bahwa warga desa Karang Sari memiliki kepuasan pada penyelenggaraan pemerintahan baik dari segi fasilitas public, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pendidikan. Dilain sisi mereka selalu ikut musyawarah dalam pembuatan program desa.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan tugas pemerintah untuk merumuskan undang undang, melaksanakan berbagai operasional sesuai dengan prinsip moral yang berlaku, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara Bapak suyatman selaku sekretaris desa berikut ini menguatkan hal ini:

*“Kami selalu mengadakan musyawarah perencanaan penggunaan alokasi dana desa dan musyawarah ini juga dilakukan secara terbuka dan siapa saja boleh ikut hadir dalam kegiatan musyawarah tersebut. Agar masyarakat mengetahui berapa banyak dana alokasi di Desa Karang Sari dan penggunaannya, setelah musyawarahkan ada penetapan apa-apa saja yang akan dibelanjakan menggunakan alokasi dana desa dan semuanya itu kami muat dalam sebuah baliho yang sudah ada di depan kantor desa”*

Hal ini didukung oleh hasil terhadap wawancara bersama Ibu Suhartini selaku Kepala Desa sebagai berikut:

*“Supaya masyarakat percaya dengan aparat desa, dalam kegiatan musrenbang desa semua kalangan termasuk masyarakat pun boleh menghadiri musrenbang tersebut. Tujuan melibatkan masyarakat, agar kami pihak pemerintahan bisa transparan dalam mengelola alokasi dana desa terhadap masyarakat Desa Karang Sari. Setelah dilakukan musyawarah desa, pemerintah desa juga menyiapkan baliho yang akan di pasang di depan kantor desa untuk menyampaikan informasi alokasi dana desa, sehingga siapa saja bisa membaca dan mengetahui anggaran dana desa tersebut”*

Masyarakat mengharapkan hasil yang memadai untuk menciptakan kemajuan desa, setelah melalui proses yang cukup panjang untuk mewujudkan pengelolaan dana desa. Dalam wawancaranya,

Karti, salah satu warga masyarakat desa, memberikan penjelasan berikut ini:

*“Untuk Pembangunan ada perkembangan dari tahun ke tahun terutama jalan Desa karangsari”*

Hal serupa dari bapak Rusman, selaku masyarakat desa menyatakan bahwa:

*“pembangunan di Desa Karangsari sangat berkembang, saya liat di balai desa terdapat bangunan baru berupa tempat pertemuan di balai desa yang sangat luas dan bagus”.*

Berikut foto gedung pertemuan Desa Karangsari”:



## 2) Transparansi

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Ini membantu mendorong integritas, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar melayani kepentingan masyarakat secara luas. Dengan mengutamakan transparansi, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

### a. Ketersediaan informasi yang diakses masyarakat

Ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah konsep yang sangat penting dalam suatu konteks dalam tata pengelolaan yang baik dan transparansi pemerintahan. Ini mengacu pada kemudahan

dan ketersediaan informasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat secara terbuka dan jelas.

Pemerintah atau lembaga publik harus menyediakan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait kebijakan, anggaran, program-program pemerintah, dan keputusan-keputusan penting. Informasi tersebut harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Informasi yang disediakan harus mudah diakses oleh semua orang tanpa hambatan berarti. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan informasi secara daring (online) dan offline, serta bahasa yang dapat dimengerti oleh beragam lapisan masyarakat.

Publikasi pengelolaan dana dalam desa adalah proses penting yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Dana desa diartikan sebagai sumber daya yang penting untuk mendukung pembangunan lokal dan kesejahteraan dalam kelompok masyarakat, oleh karena itu dinilai penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana ini dilakukan dengan secara transparan dan efektif. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Karang Sari yaitu Ibu Suhartini.

*“Kami selalu melaporkan rencana dan realisasi anggaran yang kami buat dengan cara mempublikasikan melalui media pamphlet dan baliho pada titik yang ramai di desa kami supaya masyarakat dapat melihat dan mengawasi kinerja pemerintah desa.”*

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Sekretaris Desa Karang Sari, Bapak Suyatman, mengatakan bahwa:

*“Publikasi merupakan langkah utama yang kami lakukan di Desa Karang Sari untuk memberikan laporan pada masyarakat”.* Sejalan dengan ungkapan Kepala Dusun Karang Sari, menjelaskan sebagai berikut:

*“Kami sudah melakukan publikasi rencana dan realisasi pembangunan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan dan mencakup pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia. Salah satu persyaratan yang diubah dalam peraturan ini adalah Bupati harus melaporkan realisasi keuangan daerah. Dengan

diterapkannya peraturan tersebut, diharapkan investasi real estate yang dipimpin desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan penduduk desa. Keterlibatan dan pengawasan masyarakat melalui laporan realisasi anggaran juga sangat penting untuk menjaga integritas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Bersumber dari apa yang disampaikan sekretaris desa Karang Sari didapati bahwa publikasi laporan kinerja penggunaan dana desa telah dilakukan dengan baik. Publikasi dilakukan di depan kantor desa serta beberapa titik strategis dengan media baliho dan pamflet.

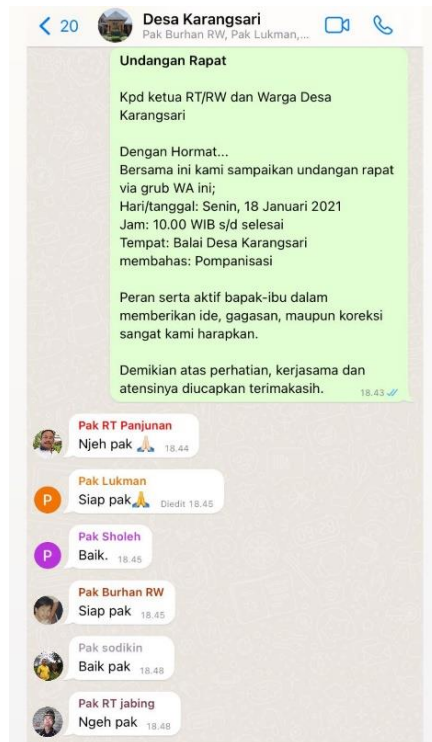
b. Keterbukaan proses

Keterbukaan proses (transparansi proses) mengacu pada prinsip di mana semua tahapan atau langkah dalam suatu proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan pemerintahan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan publik, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan. Keterbukaan proses yang dijelaskan disini dengan adanya setiap kegiatan melalui musyawarah dalam desa dalam hal pembangunan maka seluruh perangkat desa akan turut serta terlibat. Dalam pertemuan ini aparat dalam desa serta kelompok masyarakat dapat mengikuti setiap rapat pertemuan yang dilakukan rutin oleh pemerintah desa. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa, Bapak Suyatman bahwa:

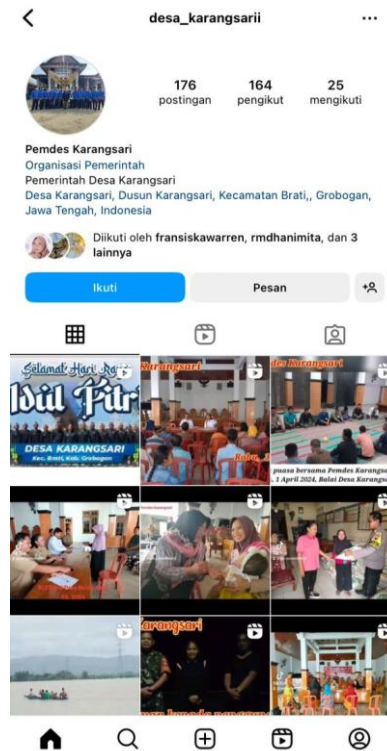
*” Kepala desa berhak memiliki ataupun membuat keputusan mengenai bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana desa tapi tetap masyarakat turut serta ikut dilibatkan dalam rapat sebagai bentuk persetujuan untuk penyusunan rencana kerja pada desa itu. Informasi yang relevan terkait dengan proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan pemerintahan kami bahas bersama dalam rapat. ” Selain melalui papan pengumuman baliho dan rapat rutin yang diadakan, masyarakat Desa Karang Sari juga memiliki akses mengulik informasi melalui grup WhatsApp, website, dan Instagram Desa Karang Sari jika ingin mengetahui dan mencari informasi.”*

Website Desa Karang Sari: <https://desa-karangsari.id/>

Berikut foto sceenshoot Grub WhatsApp Desa Karangsari:



Berikut foto instagram Desa Karangsari:



Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa:

*“Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang ada kami menyediakan grup desa yang berisi ketua RT dan RW dimana masyarakat dapat menyampaikan usulan dan kritikan kepada pimpinan daerahnya yang selanjutnya disampaikan kepada kami aparat Desa Karang Sari.”*

Selanjutnya menurut Ibu Janah, selaku Masyarakat Desa bahwa:

*“Ya, dengan adanya penyediaan informasi seperti grup whatsApp, adanya Instagram, dan website memudahkan warga desa untuk mencari informasi yang ditelaah tersedia terkait desa karangsari”*

Adapun menurut Bapak Munir, selaku Masyarakat Desa bahwa:

*“Adanya penyediaan informasi melalui Grup WhatsApp membuat adanya sistem keterbukaan yang jelas dan mudah dipahami oleh Warga Desa Karang Sari dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintah dan bisa mengkritik melalui media tersebut”.*

Terdapatnya transparansi informasi sangat penting dalam mempermudah pengawasan sosial yang dilakukan oleh warga terhadap kegiatan pemerintahan maupun institusi lainnya. Transparansi informasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi tindakan pemerintah atau lembaga publik secara lebih efektif. Dengan akses terbuka terhadap informasi, masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dalam pengelolaan dana publik. Transparansi informasi membantu mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Selain itu keterbukaan dalam hal dana desa dapat didasarkan pada kebebasan alur informasi. Informasi tentang bagaimana proses pengambilan suatu kebijakan keputusan serta pelaksanaan dalam hal kerja suatu tingkat lembaga-lembaga dapat diterima oleh siapapun yang membutuhkan, informasi tersebut harus bisa dipahami dan dipantau. Transparansi adalah salah satu nilai dari prinsip good governance, (Tjokroamidjojo, 2001). Transparansi yaitu memberikan suatu keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat tanpa adanya hal yang ditutupi secara menyeluruh dan dapat di pertanggungjawabkan

instansi pemerintah desa. Berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Sari. Terkait dengan indikator transparansi memiliki satu sub indikator antara lain: ketersediaan informasi yang dinilai akurat dan terjangkau.

c. Ketersediaan Informasi yang Akurat dan Mudah

Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diartikan informasi yang dipandang cukup terbuka dan jujur terhadap masyarakat berasaskan suatu pertimbangan bahwa kelompok masyarakat mempunyai hak mengetahui secara terbuka serta menyeluruh. Sama halnya sinkron dengan hasil dari wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Karang Sari Pak Gunawan, mengatakan:

*“Dalam pelaksanaan Alokasi dana desa maupun pengelolaan dana desa pemerintah sudah terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Bahkan salah satu keterbukaan yang dilakukan yaitu membuat baliho khusus pengeluaran dan hal tersebut dapat dilihat oleh seluruh masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan transparansi dilaksanakan dengan salah satu cara membuat baliho pengeluaran dana, selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Kepala Dusun Karang Sari Bapak Gunawan, mengatakan:

*“Transparansi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) maupun pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan sebagaimana harusnya. Masyarakat mengetahui dengan berapa dana yang masuk dan yang keluar karena pemerintah sendiri sudah membuat baliho tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui pelaksanaan transparansi sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku dan sudah baik. Hal ini nantinya akan membuat penilaian positif dari masyarakat terhadap Pemerintah Desa Kampung Bukit Agung. selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Karang Sari Bapak Sardi, mengatakan :

*“Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa pemerintah dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun pengelolaan dana desa sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Desa Karang Sari”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui peneliti pemerintah Desa Karang Sari sudah transparansi dalam pengelolaan dana desa dan itu dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Karang Sari.

Semua orang harus dapat memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Contoh nyata penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi adalah inisiatif untuk menciptakan masyarakat yang transparan, saluran komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, serta platform pertukaran informasi dan komunikasi antar aktor melalui media cetak dan elektronik.

Agar masyarakat mengetahui di mana Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah Desa, maka perlu tersedia informasi yang cukup dalam setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Ibu Suhartini, Kepala Desa Karang Sari berikut ini:

*“Dalam pengelolaan dana desa, kami menerapkan prinsip transparansi. Oleh karena itu, baliho di depan kantor desa menampilkan anggaran alokasi dana desa, yang dapat dilihat oleh masyarakat desa.”*

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara Bersama Bapak Suyatman selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

*“Kami selalu mengadakan musyawarah perencanaan penggunaan alokasi dana desa dan musyawarah ini juga dilakukan secara terbuka dan siapa saja boleh ikut hadir dalam kegiatan musyawarah tersebut. Agar masyarakat mengetahui berapa banyak dana alokasi di Desa Karang Sari dan penggunaannya”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, instansi pemerintah desa telah mengimplementasikan prinsip transparansi dalam membuat baliho yang dapat dilihat oleh masyarakat dan membantu kegiatan musyawarah desa.

Pemerintah desa harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi modern untuk memudahkan masyarakat mempelajari program dan kegiatan. Masyarakat membutuhkan informasi yang siap pakai, mudah diakses, bebas biaya, dan tepat waktu. Berdasarkan penuturan di atas, berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suyatman, sekretaris desa:



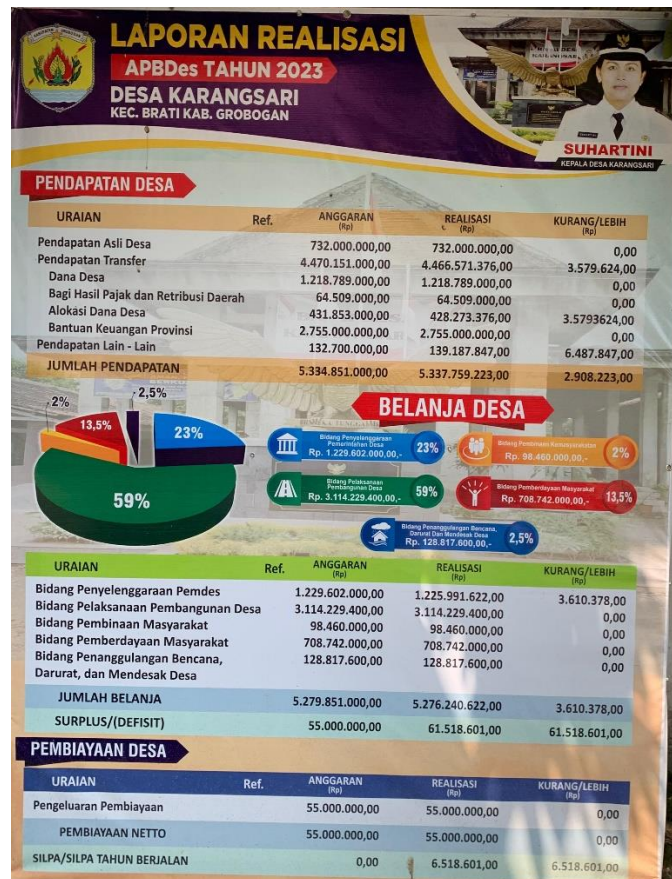
“Kita Pemerintah Desa sudah membuat website Desa Karang Sari.com untuk dapat diakses oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan zaman yang semakin canggih sehingga Masyarakat dipermudah untuk melihat kegiatan yang kami lakukan”

Kesimpulan dari interview tersebut adalah tujuan dari website pemerintah desa adalah untuk memudahkan warga melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, hal ini mendorong transparansi dan kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, mudah diakses, dan tersedia.

Berikut foto baliho infografis:



Berikut foto baliho laporan realisasi:



### 3) Partisipasi

Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat baik dilihat dalam berupa fisik maupun intuisi pemikiran serta melibatkan diri sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab demi keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan, namun juga masyarakat memiliki hak dan berperan aktif dalam melihat masalah dan potensi apa yang ada dimasyarakat agar menciptakan kelembagaan yang solid untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sofyani, 2018). Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangsari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Pada indikator Partisipatif Masyarakat terdapat beberapa sub indikator antara lain, bagaimana Mengidentifikasi potensi masyarakat kemudian terkait bagaimana cara menciptakan kelembagaan yang solid, maka dari itu peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator diatas, yaitu:

- a. Menciptakan kelembagaan yang Solid

Menciptkan kelembagaan yang solid tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif bila dilaksanakan oleh perangkat desa saja, karena membutuhkan masyarakat yang berperan aktif dalam berpartisipasi masyarakat yang mampu mengembangkan SDM dan potensi yang dimiliki masyarakat Kampung Bukit Agung. namun hal ini tentunya dibantu dengan adanya partisipasi yang dinilai cukup aktif dari masyarakat, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Bapak Suyatman mengatakan:

*“partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan Kampung di Desa Karang Sari ini sudah baik. Adanya rasa saling menghormati dan sistem kultural yang baik memungkinkan campur tangan warga masyarakat dalam setiap kegiatan khususnya perencanaan kegiatan. Masyarakat ikut berpendapat, selain itu juga keadaan kekeluargaan yang baik, ini loh yang menjadi unsur utama partisipasi masyarakat terbentuk dapat menciptakan kelembagaan yang solid”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan menciptakan kelembagaan yang solid adanya rasa saling menghormati dan sistem kekeluargaan yang baik. Dengan adanya raa kekeluargaan yang erat juga dapat berpartisipasi dengan maksimal, selanjutnya kita akan mendengar hasil wawancara dengan salah satu Warga Desa Karang Sari Ibu Nurma, mengatakan:

*“Dalam Pengeolaan Dana Desa terutama apabila dilihat dari pembangunan desa. mayoritas dari tingkat bawah dimulai dari dusun yaitu penjangkaran aspirasi yang nantinya ada namanya Musdus atau Musyawarah dusun dan hasilnya akan direkap dan disampaikan di musyawarah tingkat desa yang disebut Musrembang Desa. Jadi disini adanya pelibatan dari perwakilan masyarakat yang meliputi dari wakil perempuan, pemuda, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi aspirasi masyarakat sendiri di sampaikan dalam musyawarah dusun nantinya akan di rembuk dan diambil tujuan dari aspirasi tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui musyawarah dilakukan dari Musdus terlebih dahulu kemudian nanti perdebatan aspirasi pada saat musyawarah dusun akan di ambil intinya yang nantinya akan di bahas ketika musyawarah tingkat desa bernama MusrembangKampung, hal ini sudah baik dalam menciptakan kelembagaan yang solid dapat dilihat dari berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat saat musyawarah bahwa setiap kegiatan

pemerintahan Desa Karang Sari masyarakat merupakan unsur terpenting tercapainya hasil yang maksimal.

b. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (perencanaan)

Perencanaan memiliki hal peran yang sangat dinilai penting dalam pengelolaan dana desa karena membantu memastikan bahwa anggaran dana desa digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Perencanaan membantu desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan merencanakan secara sistematis, desa dapat mengidentifikasi proyek atau program yang paling penting dan memberikan manfaat maksimal bagi penduduk desa. Suhartini aktif dalam mensosialisasikan mendorong partisipasi masyarakat dalam musrembangdes. Suhartini selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta yang dibuktikan pemerintah desa selalu membuat undangan yang dikirim melalui WA grup dan juga diantarkan kerumah warga desa. Seperti yang diungkapkan Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Karang Sari bahwa:

*“Perencanaan program dan kebijakan desa kami lakukan dengan cara musyawarah dengan warga dan tokoh desa.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Dusun Karang Sari bahwa:

*“Kami pemerintah Desa mengajak tokoh Masyarakat untuk duduk bersama membahas pengalokasian dana desa,”*

Temuan wawancara menunjukkan bahwa diskusi dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan para pemimpinnya. Dapat dikatakan telah terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat. Semangat yang ditunjukkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh yang menghadiri kegiatan musyawarah merupakan indikasi akan hal ini. Berikut temuan wawancara dengan Sekretaris Desa yang memperjelas hal tersebut:

*“kami mengundang para perangkat Dusun seperti ketua Pemuda, RT, Kadus, dan BPD untuk membahas perencanaan Pembangunan fisik maupun non fisik, alhamdulillah mereka antusias untuk mengikuti kegiatan ini”*

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan dana desa menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Temuan wawancara selanjutnya menguatkan hal ini:

*”Tokoh Masyarakat seperti Ketua pemuda, RT, kadus, BPD, Karang Taruna dan Tetua dusun di undang untuk Musyawarah”*

Hal ini menunjukkan adanya aktivitas deliberatif para tokoh masyarakat dalam pengalokasian dana desa. Peran warga sangat penting dalam memantau penyaluran dana desa, sehingga pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan bersifat terbuka.

Pemerintah Desa mengutamakan program apa yang benar-benar dibutuhkan dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor, dengan mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat maupun tokoh masyarakat.

*“saat perencanaan Pembangunan kami mendengar semua aspirasi dari tokoh Masyarakat kami pilih program yang di prioritaskan dan sangat dibutuhkan oleh Masyarakat untuk di realisasikan”*

Pemerintah desa menggunakan sejumlah diskusi, antara lain Musdes (Musyawarah Desa) dan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), untuk menyebarluaskan informasi tentang perencanaan dana desa.

*”Hasil musyawarah dusun (Musdus) dan Musyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) kami beritahu kepada Masyarakat”*

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Karang Sari melakukan proses perencanaan dana desa melalui partisipasi masyarakat dan transparansi melalui kegiatan musyawarah. Mengingat masyarakat merupakan entitas yang memiliki program dan mempunyai kewenangan untuk mengawal dan memantau operasionalnya.

Kegiatan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan dalam infrastruktur pembangunan desa Karang Sari biasanya dilakukan oleh Pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendorong partisipasi aktif setiap anggota masyarakat desa. Dalam proses pengembangan program pembangunan desa, masjid merupakan tempat krusial dimana visi, rencana, dan kegiatan pembangunan didiskusikan dan diputuskan

berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suryo sebagai pemahaman masyarakat umum, yaitu:

*“Warga desa Karang Sari selalu dilibatkan dalam setiap musyawarah desa. Dimana setiap ada kegiatan dan program pembangunan kami ikut memantau apa yang dilakukan pemerintah desa. Selain itu aparat desa rajin memberikan informasi ke kami.”*

Berikut foto musyawarah masyarakat dengan pemerintahan desa karangsari:



c. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi dalam hal pelaksanaan pembangunan merupakan konsep di mana masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan keterlibatan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga pembangunan, serta masyarakat itu sendiri. Dengan memastikan partisipasi yang nyata dan berkelanjutan, pembangunan dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi pembangunan dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar keterlibatan dan peran masyarakat dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Partisipasi pada tahap implementasi dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan proyek atau program pembangunan. Seperti yang diungkapkan Ibu Suhartini (Kepala Desa) bahwa:

*“Ya, kami mengutamakan keikutsertaan masyarakat pada setiap musyawarah desa agar program pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.”*

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa:

*“Benar mbak, kami selalu diikutsertakan oleh Bu Kades ketika membahas program dan pembangunan desa.”*

Pernyataan yang lain juga diungkapkan bahwa:

*“Warga desa terlibat hamper pada semua kegiatan desa, mayoritas warga sini senang ketika melakukan kerja bhakti demi pembangunan desa.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa warga Desa Karang Sari aktif melakukan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan senang ketika melakukan kerja bersama.

Selain partisipasi pemanfaatan hasil diatas, ada juga pemanfaatan hasil dengan adanya dana desa tersebut pemerintah desa memberikan wadah masyarakat untuk berpartisipasi, partisipasi yang dilakukan adalah:

#### 1. Ikut berjualan

Mereka bisa berjualan di tempat wisata Geopark yang sudah disediakan sebagai pedagang (pedagang es, pedagang jahung bakar, pedagang nasi, dan lain-lain), bisa juga menjadi tukang sapu, tukang parkir. Dari situ mereka bisa mendapat pemasukan dan yang asalnya pengangguran bisa mendapat pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ibu Suhartini bahwa:

*“Pembuatan tempat wisata yang bernama Geopark di desa Karang Sari. Dari adanya wisata geopark di desa Karang Sari otomatis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran khususnya desa sekitar Desa Karang Sari kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang asalnya banyak ibu-ibu, anak-anak muda di Desa menganggur dan setelah adanya program ini banyak yang bisa bekerja ditempat wisata*

*tersebut seperti disediakan lapak untuk berjualan dan banyak diisi oleh ibu-ibu PKK dan untuk anak-anak muda dijadikan sebagai karyawan di wisata tersebut. Di lapak tersebut menjual berbagai jenis UMKM yang memasarkan hasil keterampilan cemilan, kerajinan tangan, dll. Dengan adanya program unggulan wisata geopark tersebut, Desa karangsari mempunyai BUMDes yang setiap tahun kira-kira bisa menghasilkan ratusan juta untuk pendapatan asli Desa.”*

Hal selaras juga dituturkan oleh Bapak Darno ( masyarakat desa) bahwa:

*“Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa karangsari, meningkatkan perekonomian. Masyarakat yang berjualan disitu seperti penjual bakso, nasi pecel, es teh, jagung bakar, dan lain lain yang laris manis. Di dalam lapak Geopark pun juga sama yang berjualan makanan diresto dan warung-warung laris manis terutama pada saat hari libur sabtu dan minggu di tempat wisata Geopark dipenuhi dengan pengunjung berwisata dan para pedagang diluar maupun didalam tempat wisata Geopark laris manis.”*

#### d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses atau aktivitas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan atau program guna memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama pelaksanaan dan memberikan tindakan perbaikan atau koreksi yang diperlukan.

Pengawasan merupakan bagian integral dari manajemen dan pelaksanaan kegiatan atau program yang efektif. Pengawasan yang baik akan membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan dari suatu inisiatif pembangunan atau kegiatan lainnya.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan mengacu pada sejauh mana masyarakat atau penerima manfaat terlibat dalam menggunakan, mengelola, dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Partisipasi pada tahap ini menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan dampak positif dari proyek atau program pembangunan. Manfaat dari hasil pembangunan



merupakan produk atau output dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur suatu wilayah atau masyarakat. Manfaat dari hasil pembangunan dapat sangat beragam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suhartini (Kepala Desa) bahwa:

*“Warga desa pasti dilibatkan dalam setiap program desa sehingga semua hasil bisa tercapai dengan baik, dan warga juga bisa menyampaikan kritik membangun.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sunaryo (Tokoh masyarakat) bahwa:

*“Ya, masyarakat Desa Karang Sari umumnya sangat aktif mengawasi program kami dan tak segan memberikan masukan.”*

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Mbak Septa (masyarakat) bahwa:

*“Kami senang atas hasil yang dicapai oleh program yang dilakukan pemdes selain itu manfaat pembangunannya kami gunakan secara maksimal dan memelihara hal tersebut.”*

Bersumber dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan terlihat bahwa warga Desa Karang Sari telah melaksanakan kaidah partisipasi pada pemanfaatan hasil. Warga desa telah melakukan pengawasan pada proses pembangunan serta telah menikmati hasil kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

#### Partisipasi dalam evaluasi

Tingkat partisipasi telah dilihat pada tahap akhir yaitu evaluasi dari hasil dalam program pembangunan mengacu pada sejauh mana masyarakat atau pihak terkait terlibat dalam proses evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai. Evaluasi merupakan langkah penting dalam siklus pembangunan untuk mengukur efektivitas, keberlanjutan, dan dampak dari kegiatan atau proyek pembangunan. Partisipasi dalam tahap evaluasi memastikan bahwa perspektif masyarakat dipertimbangkan dan hasil evaluasi dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suhartini (Kepala Desa) bahwa:

*“Evaluasi kami lakukan dengan melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat.”*

Partisipasi aktif dalam tahapan evaluasi di Desa Karang Sari merupakan sebuah hal yang positif dan membuktikan keterlibatan yang

kuat dari masyarakat dalam proses pembangunan. Budaya memberikan kritik dan masukan konstruktif memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam evaluasi, pemerintah desa akan lebih bertanggung jawab dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang diterima. Hal ini mendorong kinerja pemerintah desa untuk lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Pada saat rapat musyawarah maka sering pula diambil suatu kebijakan keputusan baik dalam lingkup musyawarah kecil ataupun musyawarah dalam tingkatan desa atau biasa disebut dalam Musdes, ataupun musyawarah dalam, pembahasan rencana pembanguna infrastruktur desa atau biasa disebut Musrenbangdes, dalam rapat ini pasti melibatkan banyak tokoh mulai dari perangkat desa, pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh dalam lapisan masyarakat, dengan demikian maka pertukaran pendapat terjadi secara merata dan menyampaikan pendapat dapat leluasa disampaikan dengan hak yang tiap individu miliki. Melalui musyawarah mufakat desa maka akan menciptakan suatu keberhasilan dalam rencana pemabangunan program untuk mewujudkan tujuan desa yaitu kemajuan dalam hal apapun. Dalam setiap pengambilan mufakat dalam musyawarah desa Ibu Suhartini turut andil serta dalam hal ini, berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak rohmat selaku warga desa:

*"Selama Ibu Suhartini menjabat menjadi kepala desa di sini, ia selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan maupun pengambilan keputusan. Dan itu tergambar jelas pada saat rapat bersama di kantor desa. Dan biasanya kalau mengambil keputusan itu tetap Ibu Desa, tetapi jika ada usulan dari masyarakat, misalnya keperluan masyarakat mau adakan program apa, nanti dipertimbangkan lagi oleh kepala desa dan disesuaikan dengan anggaran desa. Dan jika usulan tersebut bermanfaat untuk kemajuan desa berarti diterima tetapi jika merugikan berarti akan di pertimbangkan lagi".*

Jawaban yang mendukung disampaikan lagi oleh Bapak syahrul yang mengatakan bahwa:

*"Biasanya pada saat rapat evaluasi, perangkat desa wajib datang apalagi kami sebagai RT/RW-nya, semuanya harus hadir kecuali ada kesibukan yang lain yang tidak bisa di tinggalkan.*

*Karena setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat jadi semua stakeholders harus terlibat. Dan jujur saja sejauh ini saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena walaupun saya Cuma lulusan SD, saya jadi orang terpercaya karena dijadikan Ketua RT di sini dan setiap kali ada rapat di kantor desa saya selalu terlibat dalam menyampaikan usulan/pendapat karena kepala desa tidak pernah membedakan orang dalam menyampaikan pendapat, baik itu keluarga maupun orang lain semuanya sama rata".*

Hal yang sama pula di sampaikan oleh Ibu Sarti yang mengatakan bahwa:

*"Iya melibatkan. Karena pada saat rapat bersama/musyawarah itu ada keterwakilandi masyarakat juga untuk mengikuti rapat. Begitupun dengan saya sebagai ketua PKK disini, saya juga sering dilibatkan dalam musyawarah di Desa".*

Selanjutnya, Bapak Supri Kiik juga mengatakan hal yang sama bahwa:

*"Menurut pengamatan saya, Ibu Desa melibatkan masyarakat. Termasuk saya sebagai Pamong Adat disini juga selalu dilibatkan dalam rapat di kantor desa".*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap pertemuan yang akan diadakan di desa Kantor. Berikut wawancara yang menampilkan warga Desa Karang Sari, Ibu Yumi:

*"Iya, melibatkan. Karena pada saat rapat bersama di kantor desa dengan Kepala Desa, yang hadir itu ada BPD, LPM, Kepala-kepala Dusun, Tokoh masyarakat, RT/RW dan kami sebagai masyarakat juga hadir untuk mendengar hasil rapat. Dan setiap kali ada kegiatan di kantor desa kami selalu hadir seperti pembersihan lingkungan sekitar di kantor desa, perbaikan pagar kantor desa, kami semua hadir dalam kegiatan tersebut".*

Berdasarkan wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa penggunaan metode musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan terbukti efektif pada masa Ibu Suhartini menjabat sebagai kepala desa. Hal ini terlihat jelas melalui penggunaan pendekatan yang berpikiran terbuka dan partisipasi aktif masyarakat dalam pertemuan balai desa untuk membahas proyek konstruksi. Dengan ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang terjadi melalui Musyawarah Mufakat paling efektif dilakukan.

Kesimpulan keseluruhan dari indikator yang ada dalam Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Pada indikator akuntabilitas ini terkait dengan Perencanaan Realistis, Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan standart dan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaan dana desa tidak terlepas dari sumber daya aparatur yang profesional, sumber daya aparatur faktor penting dalam pemerintahan untuk mewujudkan profesional aparatur dalam pekerjaannya dengan cara dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis. Kemudian untuk indikator Partisipatif Masyarakat ini terkait dengan pemerintah desa yang mengidentifikasi potensi masyarakat selalu berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa berpartisipasi berupa pikiran, tenaga serta waktu walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli namun, masyarakat sudah baik dalam berperan langsung untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mempererat kekeluargaan serta bertanggungjawab yang menciptakan kelembagaan yang solid. Selanjutnya untuk indikator Akuntabilitas ini terkait dengan ketersediaan informasi laporan yang akurat yang dilakukan oleh pemerintah secara terbuka dan masyarakat bisa memahami seperti, membuat baliho atau mencatat di papan tulis desa mengenai penggunaan anggaran desa.

## **B. GAYA KEPEMIMPINAN SUHARTINI**

### **a. Tegas dalam mengambil sikap**

Salah satu pendekatan yang paling awal untuk mempelajari kepemimpinan yaitu pendekatan ciri. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat pemimpin seperti kepribadian, motivasi, nilai, dan ketrampilan. Terlihat dari ciri beliau yang sangat tegas dan bijaksana dalam pengambilan keputusan.

Pada pendekatan ciri ini terlihat bahwasanya Suhartini adalah pribadi yang tegas dalam memimpin Pemerintahan Desa. Hal tersebut terlihat dari contoh bagaimana Suhartini dalam mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga maupun perangkat desa yang lain. Pada pendekatan ciri ini Suhartini sebagai Kepala Desa Karangari merupakan seorang yang dipandang dalam masyarakat sebagai warga yang memiliki kepribadian yang sangat baik dan dipandang sebagai salah satu warga yang patut dan pantas untuk dijadikan contoh serta dijadikan panutan dalam menjalani kehidupan yang ada sesuai.

Paparan di atas menunjukkan bahwa Ibu Suhartini menjadikan pribadi yang tegas sebagai ciri khas beliau dalam berpikir di masyarakat tak heran hal tersebut yang nantinya menjadikan beliau dipercaya oleh masyarakat Karang Sari yang nantinya di amanati sebagai pemimpin Desa Karang Sari atau yang sering disebut kepala desa, hal tersebut juga yang mampu mempertahankan beliau untuk selalu di percaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka, selama beliau menjabat sebagai pemimpin pula beliau mampu membangun dan membawa Desa Karang Sari berkembang pesat sehingga Desa Karang Sari sampai di pandang sebagai desa yang baik di Kabupaten Grobogan hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh salah satu perangkat desa yang mana menjadi rekan kerja Ibu Suhartini sebagai berikut:

"menurut saya, Ibu itu orangnya sangat tegas dimana Ibu itu kalo apa-apa selalu meminta pertimbangan kepada rekan kerja dan juga masyarakat tidak seenak dirinya sendiri namun Ibu itu kalau mengadakan kegiatan masyarakat ataupun yang berkaitan dengan desa itu beliau selalu mengajak seluruh masyarakatnya tanpa pandang pilih siapa yang beliau ajak, jadi tidak heran kalo bapak itu dicintai masyarakatnya apalagi dilihat dari pencapaiannya beliau dalam mengurus dan mengembangkan desa."

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Ibu Suhartini sebagai pemimpin selalu meminta pertimbangan kepada rekan kerja dan juga masyarakat sehingga lebih memperkuat bahwa Ibu Suhartini ketika memimpin beliau orang yang tegas dalam pengambilan sikap. Adapula yang mengatakan bahwa Ibu Suhartini sebagai pemimpin di desa Karang Sari sangatlah baik dan bijaksana dalam segala pengambilan keputusan yang ada dan juga dalam berbagai kegiatan Ibu Suhartini dapat menyatukan masyarakatnya yang banyak.

Dari sikap tegas yang beliau terapkan menjadikan ciri bagaimana Suhartini itu pemimpin yang demokratis dan juga kharismatik adalah salah satu ciri Suhartini dalam upaya memimpin desanya sesuai dengan uraian diatas masyarakatnya juga menyatakan bahwa beliau adalah orang yang baik dan mampu menerima segala pendapat dan masukan dari berbagai kalangan masyarakatnya tanpa membatasi sedikitpun.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri khas gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ibu Suhartini dilihat dari pendekatan ciri yaitu yang pertama Ibu Suhartini memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dimana dapat dilihat dalam berbagai komentar dari masyarakat yang beliau pimpin rata-rata mereka menyatakan bahwa Ibu Suhartini orangnya sangat demokratis dalam memimpin ditandai sikap beliau sangat tegas dalam pengambilan keputusan serta mau untuk mendengarkan keluhan masyarakatnya dan juga mau menerima kritik dan saran dalam melaksanakan kepemimpinan.

Sesuai dengan pengelolaan dana desa menunjukkan gaya kepemimpinan yang Demokratis ditunjukkan dengan memberikan ruang keterbukaan informasi partisipasi

masyarakat dalam musyawarah desa. Paparan diatas menunjukkan bahwa Ibu Suhartini sikap tegas sebagai ciri khas beliau dalam berfikir dimasyarakat tak heran hal ini yang nantinya menjadikan beliau dipercaya oleh masyarakat Desa Karang Sari yang nantinya diamati sebagai pemimpin Desa Karang Sari atau yang sering disebut Kepala Desa, hal tersebut juga yang mampu mempertahankan beliau untuk selalu di percaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka, selama beliau menjabat sebagai pemimpin pula beliau mampu membangun dan membawa desa Botorejo berkembang pesat sehingga desa Botorejo sampai di pandang sebagai desa yang baik di kabupaten Demak hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh salah satu perangkat desa yang mana menjadi rekan kerja Ibu Suhartini sebagai berikut :

*"menurut saya, Ibu itu orang visioner dan juga demokratis dimana bapak itu kalo apa-apa selalu meminta pertimbangan kepada rekan kerja dan juga masyarakat tidak seenak dirinya sendiri namun bapak itu kalau mengadakan kegiatan masyarakat ataupun yang berkaitan dengan desa itu beliau selalu mengajak seluruh masyarakatnya tanpa pandang pilih siapa yang beliau ajak, jadi ndak heran kalo bapak itu dicintai masyarakatnya apalagi dilihat dari pencapaiannya beliau dalam mengurus dan mengembangkan desa."*

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Ibu Suhartini sebagai pemimpin selalu meminta pertimbangan kepada rekan kerja dan juga masyarakat sehingga lebih memperkuat bahwa pak Merjo ketika memimpin beliau orang yang demokratis dan selalu berprasangka baik dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dalam proses bersama dalam memajukan desa Karang Sari.

Adapula yang mengatakan bahwa Ibu Suhartini sebagai pemimpin di Desa Karang Sari sangatlah baik dan bijaksana dalam segala pengambilan keputusan yang ada dan juga dalam berbagai kegiatan Ibu Suhartini dapat menyatukan masyarakatnya yang banyak tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu warganya yang sangat kagum dengan kinerja beliau sebagai berikut:

*"Ibu itu orangnya demokratis selain demokratis Ibu juga orang yang kharismatik karena beliau itu sering menerima saran dan pendapat dari masyarakat dan anak buahnya."*

Ketegasan beliau dalam upaya berperilaku serta memimpin desanya sesuai dengan uraian diatas masyarakatnya juga menyatakan bahwa beliau adalah orang yang baik dan mampu menerima segala pendapat dan masukan dari berbagai kalangan masyarakatnya tanpa membatasi sedikitpun.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ciri khas gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ibu Suhartini dilihat dari pendekatan ciri yaitu yang

pertama Ibu Suhartini memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan sangat disiplin dimana dapat dilihat dalam berbagai komentar dari masyarakat yang beliau pimpin rata-rata mereka menyatakan bahwa Ibu Suhartini orangnya sangat tegas dalam memimpin ditandai beliau mau untuk mendengarkan keluhan masyarakatnya dan juga mau menerima kritik dan saran dalam melaksanakan kepemimpinan yang beliau laksanakan selama dua periode yang hal tersebut bukanlah hal yang sebentar dalam proses masa menjabat.

Pimpinan dan bawahan bersama dengan membuat keputusan dan kebijakan Ibu Suhartini. Pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dari politik yang mengikat seluruh masyarakat serta mencapai keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif. Maksudnya, keputusan dan kebijakan tidak menyatakan salah satu pihak atau menguntungkan satu kelompok. Tujuan masyarakat serta beberapa inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut mungkin terhambat oleh inisiatif tersebut. Aparat desa dan kepala desa, atau bawahannya, mengambil keputusan dan kebijakan. Pengambilan keputusan memutuskan suatu perkara dengan suara terbanyak dan kebijakan yang diterapkan kepala desa sesuai dengan hasil mufakat antara kepala desa dan aparat desa demi tercapainya suatu tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan pemerintah merupakan kebutuhan masyarakat.

Ibu Suhartini memberikan ruang ataupun waktu yang diperlukan bagi masyarakat secara merata untuk berekspresi. Saran, pertimbangan, atau pendapat, dan tugas diberikan dengan persetujuan melalui instruksi. Banyak kesempatan bagi lapisan masyarakat untuk menyampaikan pesan yang diberikan kepala desa kepada perangkat desa dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Salah satu contohnya adalah ketika seorang kepala desa menjadi mucikari di kantor desa untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini terutama berlaku bagi jajaran masyarakat atau perangkat desa agar dapat mencapai hasil pembangunan desa yang diinginkan. Sebagai kepala desa, seorang kepala negara harus mempunyai pengetahuan untuk menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung kepentingan masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, kepala desa harus mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa agar dapat memberikan semangat dan motivasi dalam profesionalitas kerjanya.

b. Disiplin yang tinggi

Pada Pendekatan Perilaku ini ditandai bahwasanya Suhartini adalah seorang pemimpin yang memiliki disiplin yang sangat tinggi. Dimana pendekatan ini berusaha memahami atau mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi maupun menggerakkan

pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Wujud daripada perilaku disiplin yang Suhartinj terapkan dimana dengan manajemen waktu. Dengan kedisiplinan beliau, dapat menggerakkan bawahannya untuk aktif masuk kerja setiap harinya. Perilaku pemimpin yang disiplin ini dapat menggunakan pola perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu dan mencerminkan perhatian yang tinggi dapatpada sasaran tugas serta hubungan.

Hal tersebut terlihat dari perilaku Suhartini yang sangat disiplin. Terlihat bahwa dalam agenda rapat mingguan yang dilakukan beliau minimal pada dua seminggu sekali, disitu selalu ada membahas tentang pekerjaan, proyek, serta berbagai masalah yang harus diselesaikan. Dengan memanfaatkan waktu untuk membahas dimana dibentuk rapat bersama pemerintah desa dengan timeline dan waktu yang tepat. Selain daripada itu Ibu Suhartini melakukan evaluasi kembali pada rapat tersebut terkait kinerja bawahan.

Pemimpin dengan memiliki perilaku yang berorientasi pada tugas dan hubungan. Perilaku pemimpin yang berorientasi tugas meliputi perencanaan, klarifikasi, dan pengawasan merupakan perilaku pemimpin yang efektif, yang khusus dan secara bersama-sama memengaruhi kinerja bawahan. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan tentang tujuan, prioritas, strategi, alokasi sumber daya, pemberian tanggung jawab, pembuatan jadwal kegiatan, dan alokasi waktu pemimpin itu sendiri. Klarifikasi meliputi pemberian tugas, pemberian penjelasan tentang tanggung jawab pekerjaan, penjelasan tentang peraturan dan prosedur, pemberitahuan tentang prioritas, penetapan sasaran kinerja khusus dan tenggat waktu, serta pemberian intruksi tentang bagaimana cara melakukan pekerjaan tertentu. Pengawasan melibatkan tindakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi operasi unit kerja dan kinerja tiap-tiap bawahan.

Sedangkan pemberian dukungan, pengembangan dan pengakuan merupakan perilaku penting yang berorientasi pada hubungan. Pemberian dukungan meliputi kisaran luas perilaku yakni pemimpin memperlihatkan penerimaan dan perhatian pada kebutuhan dan perasaan seseorang. Pemimpin yang perhatian dan bersahabat terhadap orang akan lebih mungkin memenangkan persahabatan dan kesetiaan mereka. Pengembangan meliputi perilaku yang bertujuan meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan memudahkan penyesuaian pekerjaan serta kemajuan karier seseorang. Hal ini serupa dengan kepemimpinan yang dilakukan Ibu Suhartini, beliau selalu menerima pendapat dan juga saran dari semua orang.

*"dalam memimpin saya cenderung selalu mendengarkan dan menerima segala bentuk saran yang diberikan warga saya kepada saya karena dari hal tersebut saya mampu menjadikan diri saya seperti apa yang di inginkan masyarakat saya dalam proses kepemimpinan yang saya lakukan di masyarakat saya".*

Menurut informasi di atas bahwa Ibu Suhartini menggunakan cara disiplin pada pendekatan perilaku yang beliau punya sehingga dengan sikap disiplin beliau dapat



menjadikan pemimpin yang baik, yang patut dijadikan panutan bagi masyarakatnya. Selain itu salah satu warga menyatakan bahwa Bapak Marjo Dudono dalam memimpin sangat komunikatif.

Berikut wawancara dengan Pak Agus selaku warga desa karangsari:

*"beliau itu kalau dalam mengambil keputusan terutama untuk perkembangan desa sangatlah baik beliau mampu membicarakan dengan tenang halus dan juga menghormati lawan bicaranya apalagi kalau tentang pembangunan desa bapak itu sangat pro aktif membicarakan tentang kemajuan desa semua warga beliau tanyai dan juga beliau mintai pendapat tentang bagaimana kemajuan desa yang baik untuk desanya"*

Gaya kepemimpinan Ibu Suhartini jika dilihat dari pendekatan perilaku dapat disimpulkan bahwa beliau sosok pemimpin yang memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, beliau cenderung menggunakan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, cara ini dirasa efektif dan berhasil membawa hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan warga. Perilaku yang dibawa Bapak marjo untuk mempengaruhi pengikutnya supaya mencapai tujuan Desa Karangsari sudah efektif dan efisien, beliau menggunakan pola perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu dan mencerminkan perhatian yang tinggi pada sasaran tugas serta hubungan.

c. Menempatkan situasi dan kondisi dengan tepat

Pada pendekatan situasional ini terlihat bahwasanya Ibu Suhartini itu pemimpin yang visioner, selain itu juga beliau adalah pemimpin yang dinamis dimana beliau sangat memikirkan suatu hal yang hendak dicapai dengan cara matang serta tidak gegabah. Seperti contoh, pada forum rapat tentu banyak adanya masukan, kritik dan saran. Suatu kebijakan yang diambil Ibu Suhartini disini beliau selalu mengambil sikap yang dinamis, beliau memikirkan kebelakang bagaimana dampak apa yang terjadi apabila menyelesaikan masalah tersebut dengan cara gegabah tanpa dipikirkan dahulu. Dan dengan cara menyelesaikan masalah tersebut juga selalu melihat situasi dan kondisi yang tepat.

Hal tersebut terlihat dari sikap Suhartini yang berani mengambil sikap untuk membuat program yang tidak hanya bisa berjangka pendek, melainkan merancang program yang berdurasi jangka panjang. Hal itu terlihat saat Musrenbangdes. Pada pelaksanaan tersebut terlihat bahwasanya ciri daripada pendekatan situasional ini terlihat ketika Ibu Suhartini memimpin kegiatan tersebut. Beliau sangat cermat terhadap apa program, rancangan, terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Karangsari. Walaupun memang sudah dijelaskan dalam RPJMDes tentunya sikap Ibu Suhartini bisa menjadi tolak ukur, dimana beliau mengoreksi kembali, mencermati melihat keadaan situasi dan kondisi.

Sama halnya dengan ketika Ibu Suhartini memimpin masyarakatnya beliau akan selalu menjadi orang yang akan mengikuti karakter masyarakatnya dimana beliau akan menyesuaikan diri dengan siapa yang beliau hadapi dengan hal tersebut tak heran Ibu Suhartini sangat di senangi

oleh warganya dan sangat di kagumi dan di hormati oleh warga- warganya. Dalam hal lainnya Ibu Suhartini selalu melihat dan memperhitungkan apa yang dilakukan setiap perangkat yang menjadi rekan kerja dalam memimpin pemerintahan yang dia laksanakan, Ibu Suhartini juga kadang akan mengarahkan dan memotivasi rekan kerjanya dalam upaya untuk memajukan desanya seperti halnya yang di utarakan salah satu perangkat yang menjadi rekan kerjanya:

*"Ibu Suhartini selalu memberi motivasi dengan semangatnya, beliau berusaha mencontohkan terlebih dahulu. Jadi beliau bekerja dengan penuh semangat, salah satu contoh kecilnya beliau selalu datang lebih pagi dari jam kerja. Pemimpinnya saja selalu semangat dan datang lebih awal masa bawahannya mau malas-malasan dan terlambat, kan malu. Jadi kita berusaha untuk mengimbangi semangat beliau dalam memimpin desa Kemudian terkait teguran terhadap yang melakukan kesalahan atau belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, biasanya beliau langsung kepada yang bersangkutan secara personal, jadi baik saya maupun yang lain kurang tau bagaimana penyampaiannya".*

Dengan adanya penyesuaian dari Ibu Suhartini dengan karakteristik pengikutnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Ibu Suhartini merupakan sosok pemimpin yang ideal, yang mampu melihat situasi dan karakter desa lalu kemudian menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Dengan dilakukannya penyesuaian tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Kepemimpinan Suhartini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang demokratis dengan ditandai dengan Akuntabilitas aparat Desa Karang Sari sudah dianggap bagus dan mencerminkan good governance, ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Pemerintah desa menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan laporan keuangan yang jelas dan terbuka untuk pemeriksaan. Selanjutnya pada transparansi Pemerintah Desa Karang Sari secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik. Informasi yang disampaikan meliputi anggaran, pengelolaan dana desa, program pembangunan, dan kegiatan pemerintah lainnya. Selanjutnya, keikutsertaan dalam suatu tugas tertentu biasanya dilakukan pada waktu-waktu shalat. Semuanya—musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa (Musdes), serta musyawarah rencana pembangunan desa, yang juga dikenal sebagai Musrenbangdes—melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dan individu yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan desa. desa agar dapat memaksimalkan potensi setiap individu untuk berkontribusi terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, setiap pengajuan usulan harus menggunakan musyawarah mufakat agar memenuhi persyaratan program desakralisasi. Pada saat yang sama, masyarakat di dewan desa mendiskusikan rencana pembangunan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan dana desa adapun saran-saran yang diajukan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Saran bagi Kepala Desa**

Kepala desa dapat memperkuat kinerja pemerintahan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Kesenambungan dan komitmen dalam melibatkan masyarakat serta berupaya memperbaiki dan menyesuaikan diri dapat dituangkan pada pengalokasian anggaran.

### **2. Saran bagi masyarakat**

Masyarakat turut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, perbaikan infrastruktur, atau program sosial lainnya untuk memajukan desa.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Meneliti lebih lanjut mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi serta dampaknya terhadap keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan..

4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Karangsari serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangsari (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi mulai dari variabel-variabel independen baik dengan cara menambah variabel atau menambah time series datanya. Sehingga data akan lebih objektif dan bervariasi hasilnya dalam melakukan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azmi, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan. *Journal Of Civic Education*.
- BPKB. (2015, November 17). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Retrieved from warta pengawas: [www.bpkp.kemenkeu.go.id](http://www.bpkp.kemenkeu.go.id)
- Fitriyah, N. A., & Setiyadi, A. (2018). Membangun Kompetensi Pemimpin dalam Mengelola Organisasi Publik. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*.
- Ghufron. (2020). TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN. *JURNAL FENOMENA*.
- Hastuti, & Ahmad, M. S. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Alesipitto kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Journal Of Sociology Education Review*.
- Hidayanto, M. (2005). Kepemimpinan dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme). *Al-Mawarid*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marwiyah, S., Wicaksono, S. A., Wahyuni, V. N., Kharimah, M., & Tiantoro, Y. (2022). Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi. *Jurnal SOSPOL*.
- Marzali, A. (2005). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Moleong, J. L. (2000). *metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, H. (2018). kepemimpinan (Leadership) berbasis karakter dalam peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. *Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*.
- Oktaresa. (2015). *Good Villagr Governance*.
- Rivai, V. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizka, A. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Surakarta.
- S. Prakarsa, J. (2016). Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah. *Legislasi indonesia*.
- Safitri, R. (2022). Analisis penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. *petitium*, 49.
- Sofyani. (2018). Penerapan tata kelola yang baik.
- Suhadi, Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal dalam Organisasi. *Jurnal Moderat*.
- Sumartini, N. E. (2021). Kepemimpinan Wanita dalam Kehidupan Sosial Perspektif Hukum Perkawinan. *Prosiding webinar Nasional LAHN-TP*.
- Tjokroamidjojo, B. (2001). *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Toksoz. (2008). *penerapan good governance*.
- Wirawan Hardianto, D. U. (2020). Sisi Gelap Pemimpin Dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Akuntansi Multiparadigma*.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I



Piagam Penghargaan sebagai juara 1 Lomba Desa tingkat Kabupaten Grobogan



Piagam penghargaan pelunasan PBB-P2 tahun 2022 sebelum jatuh tempo pembayaran



Piagam Penghargaan Desa terbaik dalam pengelolaan dana desa se kabupaten Grobogan dan se Jawa Tengah





## PAPAN MONOGRAFI DESA KARANGSARI KEC. BRATI KAB. GROBOGAN

Keadaan Bulan: Januari Th. 2021

BKP IPDN XIX

I. LUAS DAERAH (WILAYAH) DESA	
1.1 Tanah sawah	502 Ha
a. Ingasi tehnis	- Ha
b. Ingasi setengah tehnis	110 Ha
c. Sederhana	210 Ha
d. Tadah hujan	40 Ha
1.2 Tanah Kering	85 Ha
a. Pekarangan/ bangunan	41 Ha
b. Tegul/ Kebun	- Ha
c. Padang gembala	- Ha
d. Tambak / kolam	- Ha
e. Lain-lain	- Ha
1.3 Hutan Negara	10 Ha
1.4 Perkebunan Negara/Swasta	- Ha
1.5 Lain-lain (sungai, jalan, kuburan)	6 Ha

II. SARANA PEMERINTAHAN / KLASIFIKASI DESA	
2.1 Balai Desa	1 buah
2.2 Kantor Desa	1 buah
2.3 Tanah bengkok Pamong desa	- Ha
a. Tanah sawah	53.580 Ha
b. Tanah kering	- Ha
c. Tambak / kolam	- Ha
2.4 Tanah Kas Desa	18.118 Ha
a. Tanah sawah	2.872 Ha
b. Tanah kering	- Ha
c. Tambak / kolam	- Ha
2.5 Klasifikasi Desa	buah
a. Swadaya	Swakarya buah
b. Swakarya	Swakarya buah
c. Swasembada	Swakarya buah

III. SARANA PENGAIRAN YANG ADA	
3.1 Waduk	- buah
a. Baik	- buah
b. Rusak dapat dipakai	- buah
c. Rusak sama sekali	- buah
3.2 DAM	1 buah
3.3 Kincir Air	- buah
3.4 Pompa air (mesin)	5 buah
3.5 Air terjun (lebar 2m, tinggi 10m)	- buah

IV. SARANA KAPAL / PERAHU YANG ADA	
4.1 Kapal perahu motor	- buah
4.2 Perahu motor tempel	- buah
4.3 Perahu tak bermotor	1 buah

V. SARANA JALAN RAYA (PANJANGNYA)	
5.1 Jalan Kelas II	- Km rusak/Km
5.2 Jalan Kelas III	- Km rusak/Km
5.3 Jalan Kelas IIIA	- Km rusak/Km
5.4 Jalan Kelas IV	- Km rusak/Km
5.5 Jalan Kelas V	- Km rusak/Km
5.6 Jalan Berbatu	- Km rusak/Km

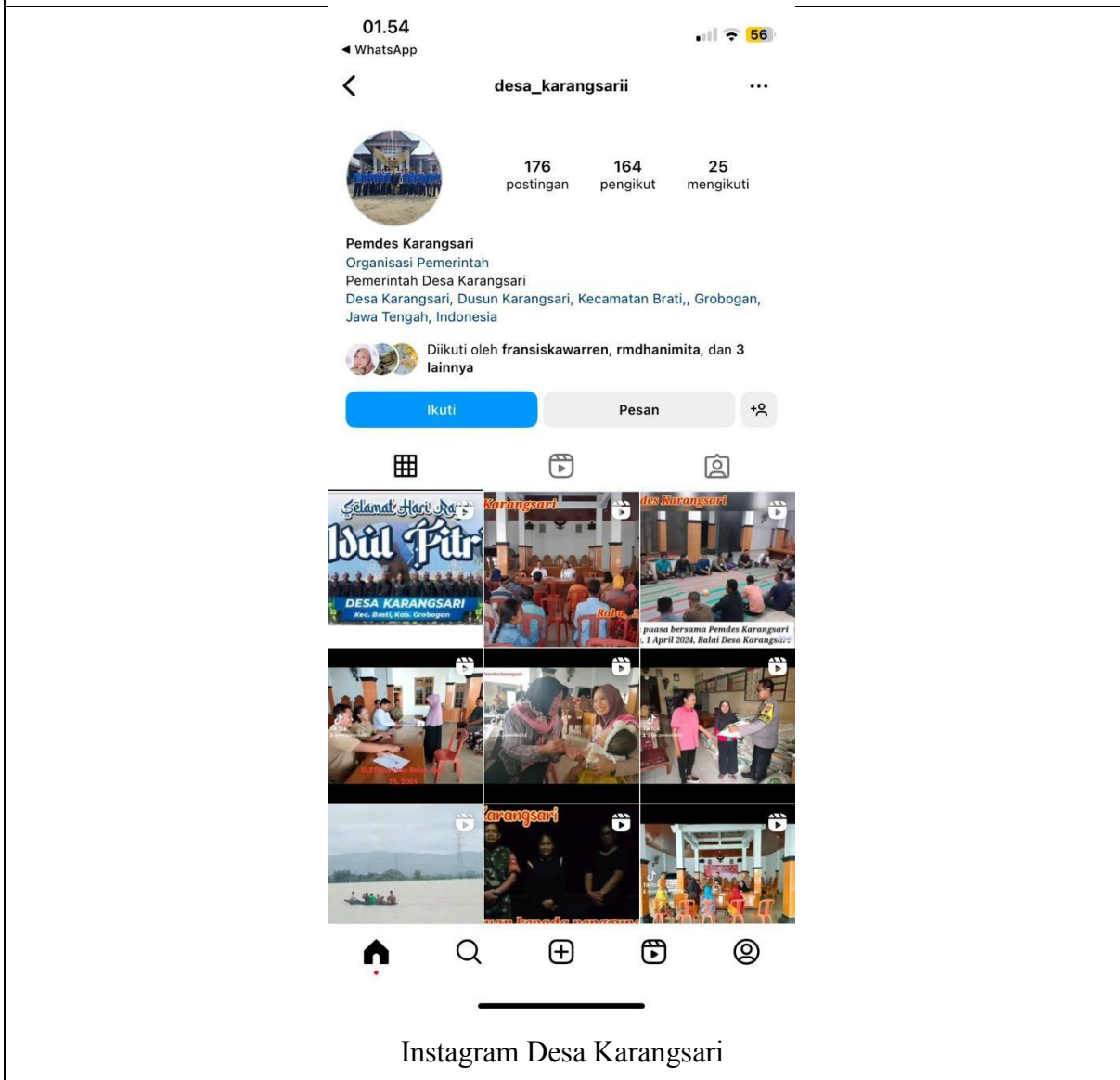
VI. SARANA PEREKONOMIAN	
6.1 Jumlah pasar	1 buah
a. Pasar Umum	- buah
b. Pasar Ikan	- buah
c. Pasar Hewan	27 buah
6.2 Jumlah toko/ kios/ warung	- buah
6.3 Jumlah BUUD /KUD	1 buah
6.4 Jumlah Koperasi simpan pinjam	- buah
6.5 Badan Kredit Desa (BKD)	1 buah
6.6 Jumlah lumbung desa	4 buah
6.7 Kredit perserongian	1 buah
6.8 Jumlah perusahaan/ Usaha	47 buah
a. Industri	19 buah, Pekerja: 19 orang
b. Perhotelan	- buah, Pekerja: - orang
c. Perdagangan	35 buah, Pekerja: 35 orang
d. Angkutan	15 buah, Pekerja: 15 orang
e. Lain-lain	6 buah, Pekerja: 6 orang

VII. BANYAKNYA RUMAH PENDUDUK	
a. Dinding dari batu gedung/semi	251 buah
b. Dinding dari bagian batu gedung/semi	41 buah
c. Dinding dari kayu papan	1040 buah
d. Dinding dari bambu / sirap	39 buah

VIII. SARANA SOSIAL BUDAYA	
8.1 Jumlah sekolah	3 bh, Guru= 3, Murid= 64
a. TK	3 bh, Guru= 3, Murid= 64
b. SD/MI	3 bh, Guru= 42, Murid= 574
c. Madrasah	3 bh, Guru= 9, Murid= 245
d. SLTP Umum	- bh, Guru= -
e. SLTP Kejuruan	- bh, Guru= -
f. SLTA Umum	- bh, Guru= -
g. SLTA Kejuruan	- bh, Guru= -
h. Kursus-kursus	- bh, Guru= -
i. Pergor Tinggi	- bh, Guru= -
8.2 Jumlah tempat ibadah	9 buah
a. Masjid	1 buah
b. Gereja	1 buah
c. Kull	17 buah
d. Lain-lain (mushola /langgar)	- buah
8.3 Tempat Hiburan / Rekreasi	- buah, tmpt duduk= -
a. Bioskop	- buah, tmpt duduk= -
b. Wayang omg/Ketoprak	- buah, tmpt duduk= -
- Ludruk / Sardiwara	- buah
c. Tempat rekreasi	3 buah
d. Lain-lain	- buah
8.4 Tempat Berobat	- buah, tmpt tidur= -
a. Rumah sakit/ Klinik	- buah, tmpt tidur= -
b. BKIA/ Pos kesehatan	- buah
c. Puskesmas	- orang
d. Dokter	5 orang
e. Perawat/ Bidan	7 orang
f. Dukun bayi	- orang

IX. PEMBANGUNAN YANG SEDANG BERJALAN PADA BULAN INI	
9.1 Sarana fisik	
a. Biaya dari Pusat	Rp. 85.194.000,-
b. Biaya dari Propinsi	Rp. 1.652.000.000,-
c. Biaya dari Kabupaten	Rp. -
9.2 Sarana non fisik	1, 10 macam, diantaranya:
1. Pelanggaran	
2. Perbaikan	
3. Perencanaan	
4. Pelaksanaan	
5. ...	

Papan Monografi Desa Karangsari



### LAMPIRAN III DOKUMENTASI



Wawancara dengan berbagai informan Sekretaris Desa Karang Sari



Kepala Dusun Karang Sari



Warga Dusun Karang Sari



Warga Dusun Karang Sari



Warga Dusun Karang Sari



LAMPIRAN IV



Kantor Balai Desa Karang Sari



Gedung Pertemuan



Peresmian Gedung Pertemuan



Suasana Rapat pertemuan di Desa karangsari

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mita Ainul Qulubutthohiroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Raden Patah RT 03/RW 01 Kecamatan Grobogan,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah  
No. HP : 083838385156  
E-mail : mitaainul1212@gmail.com



### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 2 Grobogan (2007-2013),
2. SMP Negeri 1 Grobogan (20013-2016),
3. MAN 1 Kudus (2016-2018),
4. UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)